KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012, sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik *(good governance)* dan pemerintahan yang bersih *(clean government)*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007-2012.

Secara substantif LAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Aceh tahun 2012 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian,

dalam penyajian ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian, kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Terima kasih.

Banda Aceh, Maret 2013

GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Aceh Tahun 2012 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, pengelolaan sumber daya dan sumber dana melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk pernyataan komitmen yang terdiri dari 14 (empat belas) sasaran strategis dan 138 indikator kinerja yang harus dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Aceh yang disusu dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.

Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, dilakukan pengukuran setiap indikator pada sasaran strategis yang memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sasaran strategis ”Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunya angka kemiskinan”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 109,00% dengan predikat Sangat Baik
2. Sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 88,92%, dengan predikat Baik
3. Sasaran strategis ”Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 186,21%, dengan predikat Sangat Baik
4. Sasaran strategis ”Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 142,50%, dengan predikat Sangat Baik
5. Sasaran strategis ”Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 128,72%, dengan predikat Sangat Baik
6. Sasaran strategis ”Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 110,51%, dengan predikat Sangat Baik
7. Sasaran strategis ”Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 86,60%, dengan predikat Baik
8. Sasaran strategis ”Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 108,04%, dengan predikat Sangat Baik
9. Sasaran strategis ”Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 87,89%, dengan predikat Baik
10. Sasaran strategis ”Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam”.

memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 89,88%, dengan predikat Baik

11. Sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 171,83%, dengan predikat Sangat Baik
12. Sasaran strategis ”Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 132,14%, dengan predikat Sangat Baik
13. Sasaran strategis ”Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 94,71%, dengan predikat Baik
14. Sasaran strategis ”Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 81,70%, dengan predikat Baik.

Berdasarkan akumulasi dari hasil pengukuran terhadap 14 sasaran strategis dengan 138 indikator kinerja, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 115,62%. Dibandingkan persentase tingkat capaian akuntabilitas keuangan sebesar 90,17%, berdasarkan alokasi anggaran tahun 2012
sebesar Rp. 9.711.938.653.801,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.757.321.935.052,-, dengan demikian terjadi efisiensi atau selisih tingkat capaian kinerja sebesar 25,45% dari tingkat capaian akuntabilitas keuangan.

Secara akumulatif, keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahun 2012, belum sepenuhnya diikuti pencapaian yang optimal pada beberapa indikator kinerja sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian beberapa indikator kinerja, antara lain ; penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja yang belum optimal, sistem

pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi SDM yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang sulit terjangkau dalam pencapaian program dan kegiatan pembangunan.

Untuk meminimalisir kendala tersebut Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh, serta peningkatan kualitas SDM yang berbasis kompetensi.

Banda Aceh, Maret 2013

GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kondisi Daerah 2

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur..... 3

1. Kelembagaan 3

2. Sumber Daya Aparatur 7

D. Sistematika Penyajian 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

A. Perencanaan 10

1. RPJMA Tahun 2007-2012 10

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 .. 16

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 31

B. Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja 32

C. Akuntabilitas Keuangan 85

BAB IV PENUTUP 91

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA

LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh	4
Tabel 1.2	Jumlah Jabatan Struktural menurut jenjang eselonering dilingkungan Pemerintah Aceh	7
Tabel 1.3	Jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin	7
Tabel 1.4	Jumlah PNS berdasarkan jenjang Pendidikan	8
Tabel 2.1	Matriks hubungan antara Misi dan Tujuan.....	13
Tabel 2.2.	Matriks hubungan antara Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Aceh Tahun 2012	17
Tabel 2.4.	Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2012	24
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis	32
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Menurunnya Angka Kemiskinan	33
Tabel 3.3	Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja	45
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan, Jembatan dan Sarana/Prasaran Permukiman.....	48
Tabel 3.5	Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja	49
Tabel 3.6	Pengukuran kinerja sasaran strategis meningkatnya Ketepatan Bangunan Irigasi, Pengamanan Pantai dan Normalisasi Sungai.....	51
Tabel 3.7	Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012.....	52
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Jaringan Transportasi, Komunikasi, informasi dan Telematika	53
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Pertambangan dan Energi yang berkelanjutan	55
Tabel 3.10	Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap dua indikator kinerja	58

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup..... 59
Tabel 3.12 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja 61
Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan..... 62
Tabel 3.14 Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Daya Saing Pendidikan 63
Tabel 3.15 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja 64
Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat..... 66
Tabel 3.17 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 dan target RPJMA 2007-2012 terhadap beberapa indikator kinerja 69
Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan Syariat Islam..... 70
Tabel 3.19 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja 73
Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial..... 75
Tabel 3.21 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja 76
Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Destinasi, Apresiasi Budaya dan Adat Istiadat..... 78
Tabel 3.23 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja 79
Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan secara efektif dan efisien 80

Tabel 3.25 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja 83
Tabel 3.26 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan risiko bencana 84
Tabel 3.27 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 terhadap indikator kinerja persentase pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana..... 85
Tabel 3.28 Realisasi anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Aceh tahun 2012..... 88
Tabel 3.29 Realisasi anggaran belanja Aceh tahun 2012 89
Tabel 3.30 Jumlah dan Realisais APBA dalam kurun waktu 2007-2012..... 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menganut prinsip *good governance* dan *clean government* dengan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan antara lain azas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam mewujudkan prinsip tersebut, sangat ditentukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kompetensi yang memahami tugas dan fungsinya, keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal serta partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, stabil dan dinamis dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh.

Salah satu instrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan, Pemerintah Aceh menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai media pertanggungjawaban untuk memperoleh informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013.

B. Kondisi Daerah

Secara geografis, Aceh terletak di ujung barat laut sumatera pada posisi 2°- 6° Lintang Utara dan 95° - 98°

Bujur Timur, dengan luas wilayah 58.375,63 Km² yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka,
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara,
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia, dan
- Sebelah Timur dengan Selat Malaka.

Secara administratif pemerintahan, Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 Kota, 289 Kecamatan, 761 mukim dan 6.464 Gampong, dengan jumlah penduduk sampai dengan Desember 2012 berjumlah 5.015.234 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 2.541.235 jiwa dan perempuan sebanyak 2.473.999 jiwa.

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

1. Kelembagaan

Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 7 Sekretariat, 22 Dinas dan 18 Lembaga Teknis Daerah yang diatur dalam :

1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007.
2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

3) Qanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
4) Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh,
5) Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh,
6) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh; dan
7) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh.

Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun tersebut di atas disajikan dalam tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh

No.	Satuan Kerja Perangkat Aceh	
I	**Sekretariat terdiri dari :**	
	1	Sekretariat Daerah Aceh
	2	Sekretariat DPRA
	3	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh

	5	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	6	Sekretariat Baitul Mal Aceh
	7	Sekretariat DPP KORPRI Aceh
II	**Dinas terdiri dari :**	
	1	Dinas Syariat Islam
	2	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	3	Dinas Kesehatan
	4	Dinas Pertambangan dan Energi
	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Dinas Sosial
	7	Dinas Keuangan Aceh
	8	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh
	9	Dinas Pendidikan
	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	11	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
	12	Dinas Kehutanan
	13	Dinas Perkebunan
	14	Dinas Pengairan
	15	Dinas Bina Marga
	16	Dinas Cipta Karya
	17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	18	Dinas Koperasi dan UKM
	19	Dinas Pemuda dan Olahraga
	20	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	21	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
	22	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

III	**Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :**	
	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	3	Badan Arsip dan Perpustakaan
	4	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6	Badan Investasi dan Promosi
	7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	8	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
	9	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	10	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
	11	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
	13	Inspektorat Aceh
	14	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
	15	Rumah Sakit Jiwa
	16	Rumah Sakit Ibu dan Anak
	17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
	18	Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh Januari 2013

Berdasarkan susunan organisasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagaimana tersebut di atas, terdapat 1.299 jabatan struktural menurut jenjang eselonering sebagaimana tersebut dalam tabel 1.2. berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eselonering di lingkungan Pemerintah Aceh

No.	Eselon	Jumlah
1	I b	1
2	II a	45
3	II b	20
4	III a	324
5	III b	31
6	IV a	878
J u m l a h		1.299

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh kondisi Januari 2013

2. Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Pemerintah Aceh kondisi pada 31 Desember 2012 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 9.177 dengan komposisi menurut Golongan, Jenis Kelamin sebagaimana tertera pada tabel 1.3. di bawah ini :

Tabel 1.3.
Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan jenis kelamin

No	GOL.	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV	658	220	878	9,57
2	III	3.247	2.271	5.518	60,13
3	II	1.716	948	2.664	29,03
4	I	110	7	117	1,27
JUMLAH		5.731	3.446	9.177	100,00

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh Tahun Januari 2013

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi strata 1 sebanyak 4.132 orang atau 43,11% dari jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PNS	PERSENTASE
1	S3	10	0,12
2	S2	967	8,50
3	S1	4.132	43,11
4	D4	74	0,53
5	D3	1.035	11,90
6	D2	14	0,11
7	D1	53	0,26
8	SLTA	2.703	33,04
9	SLTP	132	1,91
10	SD/MI	57	0,52
	JUMLAH	9.177	100,00

Sumber :Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh Tahun 2012

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sumber daya aparatur Pemerintah Aceh, apabila disajikan dalam bentuk grafik sebagaimana tergambar dalam grafik 1 di bawah ini :

GRAFIK 1

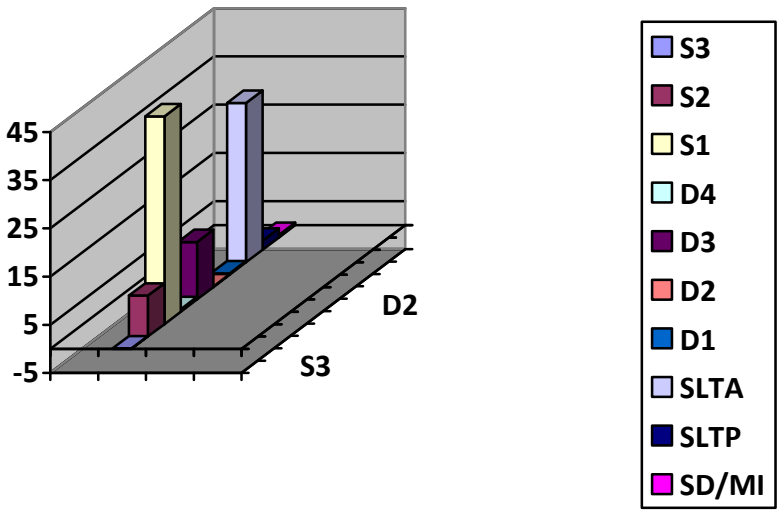

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Aceh tahun 2012 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, kondisi daerah, kelembagaan dan sumberdaya aparatur.

BAB II : **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, dengan sub bahasan RPJMA yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2012.

BAB III : **Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : **Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2012 dan uraian yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : a. Nilai-nilai Islam; b. Sosial Budaya; c. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. Keadilan dan pemerataan; dan e. Kebutuhan, dalam ayat (2) mengamanatkan perencanaan pembangunan Aceh/ Kabupaten/Kota disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk jangka menengah, Pemerintah Aceh telah menetapkan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007–2012 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2007, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara sistematis dokumen Perencanaan Pemerintah Aceh, sebagai berikut :

1. RPJMA Tahun 2007-2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007-2012 merupakan suatu tahapan rencana pembangunan Aceh yang disusun oleh Pemerintah Aceh sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program. Komponen perencanaan jangka menengah Pemerintah Aceh terdiri dari :

a). Visi

Visi Pemerintah Aceh tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran".

b). Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Pemerintah Aceh tahun 2007-2012 sebagai berikut :

1. Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif dan intuitif.

2. Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Penegakan hukum.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Pembangunan infrastruktur perekonomian, membangkitkan semangat perekonomian.
6. Pembangunan politik demi kemandirian dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.
7. Pengembangan Sumber Daya Alam secara adil, efisien, dan bertanggungjawab.
8. Pengembangan adat istiadat, kebudayaan dan olahraga.

c). Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan pembangunan Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam RPJMA tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5-6%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 16% dan tingkat pengangguran mampu ditekan menjadi 7,6%.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi.
3. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal bagi peserta didik dan anggota

masyarakat melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

4. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek status kesehatan, pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan, pembiayaan kesehatan, fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan.
5. Peningkatan pembangunan syariat Islam, sosial dan budaya sebagai sumber penuntun prilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diharapkan oleh masyarakat mulai dari pemerintahan gampong, mukim, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
7. Pengurangan resiko bencana dengan prinsip kemitraan dan kesejajaran peran.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1.	Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif dan intuitif	Terwujudnya pemimpin yang mampu membawa perubahan fundamental di Aceh dan menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas
2.	Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*)
3.	Penegakan hukum.	Terwujudnya internalisasi dan pelembagaan nilai-nilai islami, demokrasi dan hak asasi manusia guna mendorong proses pembangunan yang berkeadilan dan berkepastian hukum

		Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia secara non-diskriminatif
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Terwujudnya masyarakat Aceh berkualitas dan memiliki karakter Islami
		Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan
		Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
		Terlaksananya peningkatan pelayanan dasar yang integratif dan komprehensif, berkualitas secara adil dan merata serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelompok masyarakat, status ekonomi, sosial dan gender
5.	Pembangunan infrastruktur perekonomian, membangkitkan semangat perekonomian.	Menciptakan Stabilitas ekonomi yang kokoh
		Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif
		Menciptakan Lapangan kerja dan usaha baru
		Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan
		Meningkatkan Pendapatan Perkapita
		Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan
6.	Pembangunan politik demi kemandirian dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.	Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik
7.	Pengembangan Sumber Daya Alam secara adil, efisien, dan bertanggungjawab.	Pemanfaatan Sumber daya alam secara optimal dan lestari untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh
8.	Pengembangan adat istiadat, kebudayaan dan olahraga.	Terwujudnya kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat
		Terwujudnya masyarakat yang berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai islami dan nilai luhur budaya Aceh dalam kehidupan bermasyarakat.

d). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMA tahun 2007-2012, Pemerintah Aceh menetapkan 14 Sasaran Strategis serta 36 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan alat ukur pencapaian setiap sasaran strategis.

Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Hubungan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertera pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
Matrik Hubungan antara
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penurunan Angka Pengangguran
		Persentase Penurunan Angka Penduduk Miskin
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
		Jumlah Produksi Hasil Hutan (HTI)
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak
		Jumlah Gampong yang mendapat Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG)
		Jumlah Peningkatan Nilai Realisasi Investasi
		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor
2	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman	Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik
3	Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai	Luas Cakupan irigasi dalam kondisi baik
		Jumlah Waduk/Embung yang berfungsi dengan baik

4	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Telematika
5	Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
6	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Kota yang mendapat penghargaan lingkungan
		Jumlah kawasan konservasi sumber daya alam yang dilindungi
7	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Persentase kelulusan SD/MI
		Persentase kelulusan SMP/MTs
		Persentase kelulusan SMA/MA
8	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan	Rata-rata Nilai UN SMP
		Rata-rata Nilai UN SMA/MA
9	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
		Angka Usia harapan hidup
10	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat islam	Penanganan pelanggaran Syariat Islam
		Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS)
11	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
12	Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat	Jumlah kunjungan wisatawan
13	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ditetapkan
		Jumlah tindaklanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA)
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat
14	Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana.	Persentase Pengurangan risiko bencana pada Kabupaten/Kota rawan bencana

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007-2012 berisikan perencanaan yang bersifat makro sehingga perlu dijabarkan dengan perencanaan yang lebih mikro dalam setiap tahunnya, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Aceh.

Penyusunan RKT Pemerintah Aceh Tahun 2012 didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Aceh Tahun 2012 sebagaimana terdapat dalam tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Pemerintah Aceh Tahun 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3.20%
		Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6.5%
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	35,2 Triliun
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	32,8 Triliun
		Persentase penurunan angka pengganggguran terbuka	1%
		Persentase penurunan angka penduduk miskin	2%
		Persentase konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8%
		Persentase peningkatan pendapatan Aceh dari sumber dana perimbangan	0,75%
		Persentase penerimaan Aceh dari sumber dana otonomi khusus	5,31%
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan :	
		▪ Padi	1,954,551 Ton
		▪ Jagung	168,997 Ton
		▪ Kedelai	9,567 Ton
		▪ Kacang Tanah	8,209 Ton
		▪ Ubi Kayu	41,476 Ton
		▪ Kc. Hijau	1,624 Ton
		▪ Ubi Jalar	14,728 Ton
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan :	
		▪ Padi	5,275 Ku/Ha
		▪ Jagung	3,908 Ku/Ha
		▪ Kedelai	1,460 Ku/Ha
		▪ Kc. Tanah	1,239 Ku/Ha
		▪ Kc. Hijau	1,036 Ku/Ha

		▪ Ubi Kayu	12,766 Ku/Ha
		▪ Ubi Jalar	10,535 Ku/Ha
		Persentase luas lahan pengendalian OPT :	
		▪ Padi	52%
		▪ Jagung	25%
		▪ Kedelai	36%
		▪ Kacang Tanah	10%
		▪ Ubi Kayu	28%
		Luasan lahan yang dioptimasi	2.346 Ha
		Jumlah Desa Mandiri Pangan	40Desa
		Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam sektor pertanian	1500 orang
		Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290 unit
		Penurunan aktifitas illegal fishing di perairan Aceh	2 Wpp (571-572)
		Jumlah Produksi perikanan budidaya	116.875 Ton
		Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4 Unit
		Jumlah produksi perikanan tangkap	152.972 Ton
		Jumlah produksi olahan	48 Ton
		Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10 Jenis
		Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :	
		▪ Karet Kering	65.164 Ton
		▪ Kelapa Sawit (CPO)	182.305 Ton
		▪ Kopi (Biji Kering)	50.949 Ton
		▪ Kakao (biji Kering)	37.582 Ton
		Jumlah produksi hasil hutan (HTI)	33.000 M3
		Luas pemulihan kawasan hutan	726 Ha
		Persentase peningkatan populasi ternak	2%
		Persentase peningkatan populasi ternak besar	2%
		Persentase Peningkatan populasi ternak kecil	5%
		Persentase peningkatan populasi ternak unggas	10%
		Persentase peningkatan jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	20%
		Persentase peningkatan konsumsi telur	10%
		Persentase peningkatan konsumsi susu	3%
		Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5%
		Jumlah gampong yang mendapat bantuan keuangan peumakmue gampong (BKPG)	5.986 Gampong
		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong	85%

		Jumlah sarana permukiman transmigrasi	
		a. APBA	152 kk
		b. APBN	397 kk
		Jumlah kelompok UEPG, PEPG, UEG-SP yang mendapat pembinaan	29 Kelompok
		Jumlah Peningkatan Nilai realisasi investasi	2 Trilun Rupiah
		Jumlah usaha koperasi yang berkualitas	130 Unit koperasi
		Persentase peningkatan nilai ekspor	2%
		Persentase peningkatan populasi Usaha Kecil Menengah (UKM)	400 UKM
2.	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/ prasarana permukiman	Panjang jalan & jembatan dlm kondisi baik	1.050 Km
		Jumlah rumah sehat sederhana yang terbangun	869 Unit
		Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	80.000 M
		Panjang jaringan distribusi air minum	110.000 M
		Jumlah sarana dan prasarana pedesaan yang terbangun :	
		▪ Jalan dan Jembatan	110 Km
		▪ Sarana dan Prasarana Gedung	95 Unit
		▪ Sarana dan Prasarana Mesjid/ Meunasah	192 Unit
3.	Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai	Luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik	45.000 Ha
		Jumlah lokasi pembangunan pengaman pantai	36 Lokasi
		Jumlah lokasi pembangunan pengendalian banjir	120 Lokasi
		Jumlah Waduk/embung yang berfungsi dgn baik	6 Unit
4.	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika	Jumlah fasilitas perhubungan transportasi darat yang memenuhi standar pelayanan minimal	9 Unit Gedung PKB
			6 Traffic light
			1 Unit Zona Keselamatan
		Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan telematika	10%
		Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang kelancaran dan ketertiban distribusi Barang dan Penumpang	13 Unit Terminal Angkutan
			2 Unit Terminal Pelabuhan
			7 Unit Fasilitas Bandara

5.	Meningkatnya pengembangan pertambangan & energi yang berkelanjutan	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	3 Lokasi
		Jumlah desa pada setiap Kab/Kota yang terpenuhi jaringan listrik belum terjangkau oleh PLN	13 Kab/Kota
		Penurunan aktifitas pertambangan tanpa izin	10%
		Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	0,01%
		Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB	0,05%
		Rasio desa ketersediaan air bersih dari sumber air tanah	0,7%
		Ratio Desa berlistrik	0,09%
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	0,08%
		Jumlah penyediaan air bersih di daerah krisis air melalui pengeboran air tanah, penurapan mata air dan bak penampungan	48 lokasi
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengawasan & penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI)	4 Kab/Kota
6.	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kota yg mendapat penghargaan lingkungan	5 Kota
		Jmlh sekolah/ dayah/ pesantren yg mendapat penghargaan lingkungan	6 Sekolah
		Jumlah perusahaan/ instansi/jasa yg sudah mengelola lingkungan sesuai dg dokumen yg dimiliki	21 Perusahaan
		Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi/polusi	4 industri
		Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai RTH	3 Kab/Kota
		Jumlah desa yg dijadikan model dlm pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan	1 desa
		Jumlah kasus pengaduan pengelolaan limbah industri yg ditindaklanjuti	3 Kasus
		Jumlah kawasan konservasi sumber daya alam yang dilindungi	6 Lokasi
7.	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Tingkat angka kelulusan SD/MI	99%
		Tingkat angka kelulusan SMP/MTs	95%
		Tingkat angka kelulusan SMA/MA	89%
		Tingkat angka kelulusan SMK	85%
		Persentase penurunan jumlah penduduk buta aksara penduduk usia produktif 15-44 tahun	2,85%

8.	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	7,31 Nilai
		Rata-rata nilai UN SMA/MA	7,40 Nilai
		Rata-rata nilai UN SMK	7,00 Nilai
		Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	6 Sekolah
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/D4 sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	40% SD/MI
			60% SMP/MTS
			85% SMA/MA/SMK
		Jmlh masyarakat Aceh yg mendapat bantuan biaya pendidikan (S-1, S-2 dan S-3) dlm dan luar negeri	8.127 Orang
9.	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Tingkat pelayanan kesehatan sesuai SPM	90%
		Tersedianya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)	4.359.791 Jiwa
		Rasio angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	16 per 1000 LH
		Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118 per 100.000 LH
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	68.8 Tahun
		Angka kesakitan malaria	10,9 per 1000 penduduk
		Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +	92%
		Angka Acute Flasid Paralysis (AFP) pada anak usia <15 tahun	4,96 per 100.000 anak
		Angka kesakitan Demam berdarah Dengue (DBD)	57 per 100.000 penduduk
		Presentase Balita dengan Gizi Buruk	0,3 %
		Jmlh pasien kesehatan jiwa yg mengikuti terapi rehabilitasi & terapi kerja (modalitas)	3.390 Pasien
		Jmlh Pasien Jiwa yg bebas Pasung	20 Pasien Pasung
		Jumlah pemulangan pasien (dropping) kesehatan jiwa	200 Pasien
10.	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam	Penanganan pelanggaran syariat Islam	150 Kasus
		Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS)	7.000.000.000 Rupiah
		Jmlh produk makanan, Obat-obatan &Kosmetika mendapat sertifikasi Halal	10 Produk
		Jmlh Fatwa Ulama, himbauan, seruan & Taushiyah yg diterbitkan	19 dokumen
		persentase penurunan kasus pelanggaran Qanun & Pergub	18 %
		persentase penurunan kasus gangguan ketentraman & ketertiban umum	12 %

		rasio penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam di Mahkamah Syariah dg jmlh kasus yg ditangani	20%
		Jumlah gampong percontohan bersyariat Islam	23 Gampong
		Advokasi trhdp Qanun, Pergub, Kepgub Syariat Islam	250 Kasus
		Jmlh Qari-Qariah yg berpartisipasi pd STQ & MTQ Nasional/ Internasional	98 Orang
		Jmlh Ran Qanun Bidang Syariat Islam yg disusun	2 Qanun
		Jmlh Da'i yg ditempatkan pd daerah perbatasan & terpencil	150 Orang
		Jmlh peserta pelatihan peningkatan kapasitas Imeum Mesjid, Imeum Meunasah dan Remaja Mesjid dlm pelaksanaan syariat Islam	446 Orang
11.	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial	Jmlh penanganan Penyandang Masalah Kes. Sosial (PMKS)	2.312 Orang
		Jmlh rumah layak huni yg dibangun/direhab utk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kaum dhuafa	364 Unit
		Jmlh anak yg mendapat pelayanan & perlindungan sosial	7.171 Orang
12.	Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat	Jmlh kunjungan wisman ke Aceh	29.400 Orang
		Jmlh kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	997.620 Orang
		Jmlh pengembangan objek pariwisata	20 Objek
		Persentase penyelesaian kasus perselisihan Adat	50%
13.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ ditetapkan	700 KepGub
			80 PerGub
			10 Qanun
		Jumlah gugatan terhadap Pemda yg diselesaikan	5 Kasus
		Jmlh tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	190 LHP
		Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti	35 Kasus
		Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100%
		Persentase kesesuaian perangkat daerah yg tepat fungsi dan tepat ukur	86%
		Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	10.91%
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh	1%
		Jumlah Unit Layanan yang telah memiliki SOP berstandart International	2 Unit

		Jumlah penggunaan aplikasi pendukung E-gov Pemerintah Aceh utk pemenuhan pel. informasi publik	7 Aplikasi
		Persentase Peningkatan Asset Milik Pemerintah Aceh yang digunausahakan	85%
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
		Persentase peningkatan penerbitan dokumen izin dan non izin	1%
		Persentase penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%
		Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	77,67%
		Persentase tingkat kehadiran Aparatur dalam peningkatan disiplin	100%
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat struktural dan teknis/fungsional	15%
14.	Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana	persentase pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana	25%
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	75%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem AKIP dalam rangka membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Penetapan Kinerja menggambarkan target kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah, memuat Sasaran strategis, indikator kinerja dan target.

Pemerintah Aceh pada tahun 2012 telah menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan salah satu perwujudan komitmen dan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki berdasarkan Rencana Kinerja

Tahunan yang telah disusun sebagaimana tertera dalam tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja
Pemerintah Aceh Tahun 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3,20	%
		Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6,5	%
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	35,2	Triliun
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	32,8	Triliun
		Persentase penurunan angka pengganggguran terbuka	1	%
		Persentase penurunan angka penduduk miskin	2	%
		Persentase peningkatan konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8	%
		Persentase peningkatan pendapatan Aceh dari sumber dana perimbangan	4,29	%
		Persentase peningkatan penerimaan Aceh dari sumber dana otonomi khusus	17,6	%
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan		
		a. Padi	1.889.996	Ton
		b. Jagung	148.525	Ton
		c. Kedelai	57.016	Ton
		d. Kacang Tanah	6.293	Ton
		e. Kacang Hijau	1.309	Ton
		f. Ubi Kayu	41.286	Ton
		g. Ubi Jalar	15.768	Ton
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan		
		a. Padi	46,63	Ku/Ha
		b. Jagung	37,57	Ku/Ha
		c. Kedelai	14,07	Ku/Ha
		d. Kacang Tanah	11,86	Ku/Ha
		e. Kacang Hijau	10,50	Ku/Ha
		f. Ubi Kayu	127,58	Ku/Ha
		g. Ubi Jalar	105,68	Ku/Ha
		Persentase luas lahan pengendalian OPT		
		a. Padi	52	%
		b. Jagung	25	%
		c. Kedelai	36	%
		d. Kacang Tanah	10	%
		e. Ubi Kayu	28	%
		Luasan lahan yang dioptimasi	2.346	Ha
		Jumlah Desa Mandiri Pangan	40	Desa

		Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam sektor pertanian	1.500	Orang
		Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290	Unit
		Penurunan aktifitas illegal fishing di perairan Aceh	2	Wpp (571-572)
		Jumlah Produksi perikanan budidaya	116.875	Ton
		Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4	Unit
		Jumlah produksi perikanan tangkap	152.972	Ton
		Jumlah produksi olahan	48	Ton
		Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10	Jenis
		Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah		
		a. Karet (kering)	65.264	Ton
		b. Kelapa Sawit (cpo)	182.305	Ton
		c. Kopi (biji kering)	50.949	Ton
		d. Kakao (biji kering)	37.582	Ton
		Jumlah produksi hasil hutan (HTI)	33.000	M^3
		Luas pemulihan kawasan hutan	726	Ha
		Persentase peningkatan populasi ternak	2	%
		Persentase peningkatan populasi ternak besar	2	%
		Persentase Peningkatan populasi ternak kecil	5	%
		Persentase peningkatan populasi ternak unggas	10	%
		Persentase peningkatan jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	20	%
		Persentase peningkatan konsumsi daging	5	%
		Persentase peningkatan konsumsi telur	10	%
		Persentase peningkatan konsumsi susu	3	%
		Persentase peningkatan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan	5	%
		Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5	%
		Jumlah gampong yang mendapat bantuan keuangan peumakmue gampong (BKPG)	5.986	Gampong
		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong	85	%
		Jumlah sarana permukiman transmigrasi		
		a. APBA	152	KK
		b. APBN	397	KK
		Jumlah kelompok UEPG, PEPG, UEG-SP yang mendapat pembinaan	29	Kelompok

		Jumlah Peningkatan Nilai realisasi investasi	2.000.000.000.000	Rupiah
		Jumlah usaha koperasi yang berkualitas	30	Unit
		Persentase peningkatan nilai ekspor	2	%
		Jumlah peningkatan populasi Usaha Kecil Menengah (UKM)	400	UKM
		Persentase peningkatan populasi Industri Kecil Menengah (IKM)	25	%
2.	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1.050	Km
		Jumlah rumah sehat sederhana yang terbangun	869	Unit
		Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	80.000	M
		Panjang jaringan distribusi air minum	110.000	M
		Jumlah sarana dan prasarana pedesaan yang terbangun		
		a. Jalan dan Jembatan	110	Km
		b. Sarana dan Prasarana Gedung	95	Unit
		c. Sarana dan Prasarana Mesjid/ Meunasah	192	Unit
3.	Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai	Luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik	45.000	Ha
		Jumlah lokasi pembangunan pengaman pantai	36	Lokasi
		Jumlah lokasi pembangunan pengendalian banjir	120	Lokasi
		Jumlah Waduk/embung yang berfungsi dengan baik	6	Unit
4.	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika	Jumlah fasilitas perhubungan transportasi darat yang memenuhi standar pelayanan minimal	9	Unit Gedung PKB
			6	Traffic light
			1	Unit Zona Keselamatan
		Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan telematika	10	%
		Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang kelancaran dan ketertiban distribusi Barang dan Penumpang	13	Unit Terminal Angkutan Barang/ Penumpang
			2	Unit Terminal Pelabuhan
			7	Unit Fasilitas Bandara

5.	Meningkatnya Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	3	Lokasi
		Jumlah desa pada setiap Kabupaten/ Kota yang terpenuhi jaringan listrik belum terjangkau oleh PLN	13	Kab/Kota
		Penurunan aktifitas pertambangan tanpa izin	10	%
		Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	1	%
		Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB	0,5	%
		Rasio desa ketersediaan air bersih dari sumber air tanah	7	%
		Rasio Desa berlistrik	0.09	%
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	0.08	%
		Jumlah penyediaan air bersih di daerah krisis air melalui pengeboran air tanah, penurapan mata air dan bak penampungan	48	lokasi
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI)	4	Kab/Kota
6.	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kota yang mendapat penghargaan lingkungan	5	Kota
		Jumlah sekolah/dayah/pesantren yang mendapat penghargaan lingkungan	6	Sekolah
		Jumlah perusahaan/instansi/jasa yang sudah mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen yang dimiliki	21	Perusahaan
		Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi/polusi	4	Industri
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang sudah mempunyai RTH	3	Kab/Kota
		Jumlah desa yang dijadikan model dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan	1	Desa
		Jumlah kasus pengaduan pengelolaan limbah industri yang ditindaklanjuti	3	Kasus
		Jumlah kawasan konservasi sumber daya alam yang dilindungi	6	Lokasi
7.	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Tingkat angka kelulusan SD/MI	99	%
		Tingkat angka kelulusan SMP/MTs	95	%
		Tingkat angka kelulusan SMA/MA	89	%
		Tingkat angka kelulusan SMK	85	%

		Persentase penurunan jumlah penduduk buta aksara penduduk usia produktif 15-44 tahun	2,85	%
8.	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	7,31	Nilai
		Rata-rata nilai UN SMA/MA	7,40	Nilai
		Rata-rata nilai UN SMK	7,00	Nilai
		Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	22	Sekolah
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/D4 sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)		
		a. SD/MI	40	%
		b. SMP/MTs	60	%
		c. SMA/MA/SMK	85	%
		Jumlah masyarakat Aceh yang mendapat bantuan biaya pendidikan (S-1, S-2 dan S-3) dalam dan luar negeri	8.127	Orang
9.	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Tingkat pelayanan kesehatan sesuai SPM	90	%
		Tersedianya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)	4.359.791	Jiwa
		Rasio angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	16	per 1000 LH
		Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118	per 100.000 LH
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	68,8	Tahun
		Angka kesakitan malaria	1,09	per mil
		Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +	92	%
		Angka Acute Flasid Paralysis (AFP) pada anak usia <15 tahun	4,96	per 100.000 anak
		Angka kesakitan Demam berdarah Dengue (DBD)	57	per 100.000 penduduk
		Presentase Balita dengan Gizi Buruk	0,3	%
		Jumlah pasien kesehatan jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas)	3.390	Pasien
		Jumlah Pasien Jiwa yang bebas Pasung	20	Pasien Pasung
		Jumlah pemulangan pasien (dropping) kesehatan jiwa	200	Pasien
10.	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam	Penanganan pelanggaran syariat Islam	150	Kasus
		Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS)	7 milyar	Rupiah
		Jumlah produk makanan, Obat-obatan dan Kosmetika mendapat sertifikasi Halal	10	Produk

		Jumlah Fatwa Ulama, himbauan, seruan dan Taushiyah yang diterbit	19	dokumen
		persentase penurunan kasus pelanggaran Qanun dan Peraturan Gubernur	18	%
		persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12	%
		rasio penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam di Mahkamah Syariah dg jmlh kasus yg ditangani	20	%
		Jumlah gampong percontohan bersyariat Islam	2	Gampong
		Advokasi terhadap Qanun, Pergub, Kepgub Syariat Islam	250	Kasus
		Jmlh Qari-Qariah yang berpartisipasi pd STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	98	Orang
		Jumlah Ran Qanun Bidang Syariat Islam yang disusun	2	RanQanun
		Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150	Orang
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas Imeum Mesjid, Imeum Meunasah dan Remaja Mesjid dalam pelaksanaan syariat Islam	446	Orang
11.	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.312	Orang
		Jmlh rumah layak huni yg dibangun/direhab ntk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kaum dhuafa	364	Unit
		Jmlh anak yg mendapat pelayanan & perlindungan sosial	7.171	Orang
12.	Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat	Jumlah kunjungan Wisman ke Aceh	29.400	Orang
		Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	997.620	Orang
		Jmlh pengembangan objek pariwisata	20	Objek
		Persentase penyelesaian kasus perselisihan Adat	50	%
13.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien	Jumlah produk hukum daerah yg diundangkan/ ditetapkan :	790	Dokumen
		a. KeputusanGubernur	700	Dokumen
		b. Peraturan Gubernur	80	Dokumen
		c. Qanun	10	Dokumen
		Jmlh gugatan terhadap Pemda yg diselesaikan	5	Kasus
		Jmlh tindak lanjut temuan & rekomendasi hasil pemeriksaan	190	LHP
		Jmlh pengaduan yg ditindaklanjuti	35	Kasus

		Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%
		Persentase kesesuaian perangkat daerah yg tepat fungsi & tepat ukur	86	%
		Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	10,91	%
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh	10	%
		Jmlh Unit Layanan yg tlh memiliki SOP berstandar International	2	Unit
		Jmlh penggunaan aplikasi pendukung E-gov Pem. Aceh utk pemenuhan pelayanan informasi publik	7	Aplikasi
		Persentase Peningkatan Asset Milik Pem. Aceh yg digunausahakan	85	%
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	%
		Jmlh penerbitan dok. izin & non izin	9.346	Dokumen
		Persentase penerapan dok. perencanaan pembangunan daerah	100	%
		Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	77,67	%
		Persentase tingkat kehadiran Aparatur dlm peningkatan disiplin	100	%
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat struktural & teknis/fungsional	15	%
14	Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana	Persentase penanganan & pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana	25	%
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi & rekontruksi pasca bencana	75	%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007-2012, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan rencana pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, 1 (satu) tahunan serta pertanggungjawaban berdasarkan potensi sumberdaya dan dana yang dimiliki.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dengan standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dari program/kegitan dan sasaran untuk mengetahui sejauh mana capaian program/kegiatan dan sasaran tercapai searah dengan tujuan pelaksanan Pembangunan melaui pengukuran capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi, untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) dan selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan

pencapaian kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala pengukuran capaian kinerja sasaran strategis

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

B. Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Aceh tahun 2012 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Aceh melaporkan tingkat capaian kinerja yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) Pemereintah Aceh Tahun 2012, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang dapat dicapai pada akhir tahun 2012, serta melakukan perbandingan tingkat capaian kinerja tahun lalu dengan tingkat capaian kinerja tahun 2012, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian

kinerja setiap tahun, serta kebijakan/program dan strategi yang akan ditetapkan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dilakukan pada setiap indikator kinerja dan target kinerja setiap Sasaran Strategis, sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis pertama, "*Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan*".**

   Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 44 indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaiannya berdasarkan target kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai selama kurun waktu satu tahun sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3,2	%	5,2	162,50
2	Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6,5	%	6,06	93,23
3	Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	35,2	Triliun	36,60	103,98
4	Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	32,8	Triliun	32,68	99,63

5	*Persentase penurunan angka pengganggguran terbuka *)*	1	%	0,39	39,00
6	*Persentase penurunan angka penduduk miskin *)*	2	%	1	50,00
7	Persentase peningkatan konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8	%	5,62	70,25
8	Persentase peningkatan pendapatan Aceh dari sumber dana perimbangan	4,29	%	4,29%	100,00
9	Persentase peningkatan penerimaan Aceh dari sumber dana otonomi khusus	17,6	%	17,6 %	100,00
10	*Jumlah Produksi Tanaman Pangan *)*				
	a. Padi	1.889.996	Ton	1.727.776	91,42
	b. Jagung	148.525	Ton	158.141	106,47
	c. Kedelai	57.016	Ton	49.860	87,45
	d. Kacang Tanah	6.293	Ton	6.895	109,57
	e. Kacang Hijau	1.309	Ton	1.435	109,63
	f. Ubi Kayu	41.286	Ton	37.869	91,72
	g. Ubi Jalar	15.768	Ton	13.906	88,19
11	*Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan *)*				
	a. Padi	46,63	Ku/Ha	46,44	99,59
	b. Jagung	37,57	Ku/Ha	39,84	106,04
	c. Kedelai	14,07	Ku/Ha	14,09	100,14
	d. Kacang Tanah	11,86	Ku/Ha	12,20	102,87
	e. Kacang Hijau	10,50	Ku/Ha	10,59	100,86
	f. Ubi Kayu	127,58	Ku/Ha	128,63	100,82
	g. Ubi Jalar	105,68	Ku/Ha	105,75	100,07
12	Persentase luas lahan pengendalian OPT				
	a. Padi	52	%	51,95	99,90
	b. Jagung	25	%	15,22	60,88
	c. Kedelai	36	%	39,13	108,69
	d. Kacang Tanah	10	%	11,57	115,70
	e. Ubi Kayu	28	%	28,27	100,96
13	Luasan lahan yang dioptimasi	2.346	Ha	2.346	100,00
14	Jumlah Desa Mandiri Pangan	40	Desa	34 desa	85,00
15	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam sektor pertanian	1.500	Orang	1800	120,00

16	Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290	Unit	340	117,24
17	Penurunan aktifitas illegal fishing di perairan Aceh	2	Wpp (571-572)	2 Wpp (12 Kasus)	100,00
18	*Jumlah Produksi perikanan budidaya *)*	116.875	Ton	40.483,5 Ton	34,60
19	Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4	Unit	4	100,00
20	*Jumlah produksi perikanan tangkap *)*	152.972	Ton	146.265,5 Ton	95,60
21	Jumlah produksi olahan	48	Ton	52,4	109,20
22	Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10	Jenis	10	100,00
23	Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah				
	a. Karet (kering)	65.264	Ton	82.535 ton	126,46
	b. Kelapa Sawit (cpo)	182.305	Ton	216.249 ton	118,62
	c. Kopi (biji kering)	50.949	Ton	52.290 ton	102,63
	d. Kakao (biji kering)	37.582	Ton	30.958 ton	82,37
24	*Jumlah produksi hasil hutan (HTI) *)*	33.000	M^3	988,18 M^3	3,00
25	Luas pemulihan kawasan hutan	726	Ha	726 Ha	100,00
26	*Persentase peningkatan populasi ternak *)*	2	%	1,90	95,00
27	Persentase peningkatan populasi ternak besar	2	%	13,66	683,00
28	Persentase Peningkatan populasi ternak kecil	5	%	3,92	78,40
29	Persentase peningkatan populasi ternak unggas	10	%	1,18	11,80
30	Persentase peningkatan jmlh ternak yg mendapat pelayanan kesehatan hewan	20	%	36,39	182,00
31	Persentase peningkatan konsumsi daging	5	%	1,27	25,00

32	Persentase peningkatan konsumsi telur	10	%	0,54	5,00
33	Persentase peningkatan konsumsi susu	3	%	3,00	100
34	Persentase peningkatan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan	5	%	5	100
35	Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5	%	2.05	41.00
36	*Jumlah gampong yang mendapat bantuan keuangan peumakmue gampong (BKPG) *)*	5.986	Gampong /Desa	6.415	107,17
37	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong	85	%	100	117,65
38	Jumlah sarana permukiman transmigrasi				
	a. APBA	152	KK	197	129,61
	b. APBN	397	KK	447	112,59
39	Jumlah kelompok UEPG, PEPG, UEG-SP yang mendapat pembinaan	29	Kelompok	25	86,21
40	*Jumlah Peningkatan Nilai realisasi investasi *)*	2 triliun	Rupiah	1.269.203.702.854	63,46
41	Jumlah usaha koperasi yang berkualitas	30	Unit	57	190,00
42	*Persentase peningkatan nilai ekspor *)*	2	%	0,76	38,12
43	Jumlah peningkatan populasi Usaha Kecil Menengah (UKM)	400	UKM	1849	462,25
44	Persentase peningkatan populasi Industri Kecil Menengah (IKM)	25	%	38,42	153,68
Rata-rata persentase capaian					109,00

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan pengukuran dari 44 indikator kinerja Sasaran Strategis *"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan"* diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 109,00% atau dikategorikan ***sangat baik***. Tingkat keberhasilan ini didukung oleh beberapa indikator kinerja sasaran pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian ada beberapa indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum optimal, antara lain :

a. Indikator kinerja Persentase penurunan angka pengganggguran terbuka, Pemerintah Aceh pada tahun 2012 menargetkan penurunan 1%, dari angka pengganggguran pada tahun 2011 sebesar 8,27%, hanya mampu ditekan menjadi 7.88% atau dapat direalisasi sebesar 0,39% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 39,00%. Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pencapaian target indikator kinerja ini antara lain lambatnya pertumbuhan investasi sektor industri, manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, belum berkembang sektor dunia usaha lainnya, dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia, berakhirnya masa rehabilitasi dan rekontruksi pasca tsunami di Aceh yang diikuti pemutusan hubungan kerja atau kontrak tenaga-tenaga lokal yang bekerja pada lembaga-lembaga donor/NGO/LSM baik dalam dan luar negeri.

   Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Aceh melakukan beberapa terobosan antara lain melalui

peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan sasaran utamanya adalah pemuda putus sekolah sehingga tersedianya tenaga kerja siap pakai, baik untuk kebutuhan daerah maupun memenuhi kebutuhan luar negeri. Sedangkan tenaga kerja yang sedang menganggur ditingkatkan kemampuan skill sesuai dengan bakat dan permintaan pasar melalui pelatihan kompetensi.

b. Indikator kinerja Persentase penurunan angka penduduk miskin yang ditargetkan sebesar 2%, mampu direalisasikan sebesar 1% dengan persentase tingkat capaian sebesar 50,00%. Belum optimalnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan tidak sebandingnya tingkat pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan jumlah penduduk, serta belum berkembangnya sektor-sektor industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang dapat meningkatan pendapatan dan aktifitas perekonomian masyarakat.

Upaya penurunan tingkat kemiskinan di Aceh periode 2007-2012 menunjukkan penurunan secara signifikan, dari 26% pada tahun 2007 menjadi 18,58% pada tahun 2012, atau menurun sebesar 7,42% selama periode 2007-2012. Namun demikian tingkat kemiskinan tersebut masih tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan nasional yang sudah mencapai 12,36% pada tahun 2011.

Dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, Pemerintah Aceh dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017 menetapkan strategi penurunan tingkat kemiskinan yaitu: (1).Pemantapan ketahanan pangan, (2).Merevitalisasi pertanian dengan fokus sentra sentra komoditas unggulan daerah, (3).Penguatan dan perluasan akses modal dan pasar kepada masyarakat,(4).Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, (5).Meningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan kompetitif wilayah,(6).Meningkatkan pertumbuhan investasi, konsumsi dan daya saing daerah, (7).Peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, (8).Meningkatkan kapasitas dan nilai tambah produksi masyarakat.

c. Tingkat capaian kinerja indikator "Jumlah Produksi perikanan budidaya" yang ditargetkan sebesar 116.875 ton, hanya mampu direalisasikan sebesar 40.483,5 ton atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 34,60%, belum optimalnya tingkat capaian ini disebabkan Lemahnya akses permodalan serta masih kurangnya minat investasi terhadap usaha perikanan budidaya, Kurangnya prasarana dan sarana pendukung perikanan budidaya, Harga pakan yang masih cukup tinggi, Tingginya kegagalan produksi disebabkan oleh penyakit, Keterbatasan modal, Komoditi rumput laut masih enggan dikembangkan oleh masyarakat Aceh, Kepastian pemasaran juga belum jelas dan Masih rendahnya tingkat pendataan statistik ditingkat Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan beberapa kebijakan/ strategi antara lain :

- Meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi petani ikan dalam mengakses modal pada pihak ketiga, seperti Bank dan lembaga penyedia lainnya, sehingga tidak hanya tergantung dari bantuan modal dari pemerintah.
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya,
- Pengembangan teknologi untuk pembuatan pakan alternatif dengan bahan baku yang lebih murah,
- Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan induk dan benih dari luar yang berpotensi membawa penyakit,
- Meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya,
- Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laut bagi daerah yang mempunyai potensi,
- Peningkatan promosi sumber daya alam bagi investor yang bergerak dibidang pemasaran, sehingga akses pasar dapat terjangkau.

d. Jumlah produksi hasil hutan (HTI) yang ditargetkan sebesar 33.000 M^3 hanya mampu direalisasikan sebesar 988,18 M^3 dengan persentase tingkat capaian sebesar 3,00%, belum optimalnya tingkat pencapaian indikator ini disebabkan oleh adanya kebijakan *moratorium logging* yang diberlakukan sejak tahun

2007 untuk mendukung program *Aceh Green* guna penyediaan kebutuhan karbon dunia, sehingga izin produksi hasil hutan atau pembukaan kawasan hutan baru diberikan dengan sangat terbatas/selektif.

e. Tingkat capaian kinerja indikator "Persentase peningkatan populasi ternak unggas" yang ditargetkan sebesar 10%, hanya mampu direalisasikan sebesar 1,18% atau dengan tingkat capaian sebesar 11,80%. Rendahnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan budidaya ternak unggas secara umum masih menggunakan pola budidaya tradisional dan merupakan usaha sampingan dari usaha tani. Untuk meningkatkan budidaya ternak unggas Pemerintah Aceh melakukan upaya-upaya penyuluhan kepada masyarakat agar menggunakan pola teknologi tepat guna dalam budidaya ternak unggas.

f. Tingkat capaian kinerja indikator "Persentase peningkatan konsumsi daging", yang ditargetkan sebesar 5%, hanya mampu direalisasikan sebesar 1,27% atau dengan tingkat capaian sebesar 25,00%. Rendahnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan, nilai jual daging di Aceh sangat tinggi diakibatkan karena populasi ternak masih sangat terbatas, sehingga mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi daging, serta budaya masyarakat Aceh hanya mengkonsumsi daging pada *event-event* tertentu, misalnya hanya pada hari-hari besar umat Islam dan perayaan adat-istiadat/budaya Aceh.

Dalam rangka swasembada daging di Aceh, peningkatan populasi ternak besar dan kecil menjadi

focus pembangunan di bidang peternakan melaui peningkatan produksi dan produktivitas ternak dengan tahapan : (1) peningkatan peran Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) unntuk pelaksanaan kawin suntik (IB) dalam peningkatan populasi dan produksi; (2) optimalisasi fungsi BPTU sapi Aceh Indrapuri; (3) pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular; (4) pengembangan kawasan peternakan yang difokuskan pada suatu kawasan yang potensial dan sesuai dengan karakteristik daerah; (5) pelestarian dan pengamnbengan plasmanuftah sapi Aceh yang berlokasi di Pulau Aceh (Aceh Besar) dan Pulau Raya (aceh Jaya) yang didukung oleh regulasi; (6) peningkatan jumlah dan kapasitas petugas peternakan serta peternak; (7) pengembangan kelembagaan petani peternak.

g. Indikator Kinerja ”Persentase peningkatan konsumsi telur”, yang ditarget sebesar 10%, hanya mampu terealisasi sebesar 0,54% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 5,00%. Rendahnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan karena wilayah Aceh yang terletak pada daerah pesisir cenderung mengkonsumsi ikan dan ketersediaan telur sebahagian besar masih tergantung pasokan dari daerah lain.

   Upaya Pemerintah Aceh untuk mencapai swasembada telur dalam 5 tahun kedepan dilaksanakan melalui kebijakan yang difokuskan pada pengembangan kawasan budi daya dan inseminasi buatan ayam ras petelur serta meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menkonsumsi telur.

h. Persentase peningkatan agribisnis peternakan, yang ditargetkan sebesar 5%, mampu direalisasikan sebesar 2,05% dengan persentase tingkat capaian sebesar 41,00%. Belum optimalnya tingkat pencapaian ini antara lain disebabkan oleh rendahnya populasi, produksi dan produktifitas ternak berkaitan erat dengan terbatasnya ketersediaan dan rendahnya mutu bibit ternak serta pola perkembangan yang belum berorientasi pada agribisnis, secara umum usaha perternakan sampai saat ini masih merupakan usaha sampingan dari sistem usaha pertanian.

i. Indikator kinerja "Jumlah Peningkatan Nilai realisasi investasi" yang ditargetkan Rp. 2.000.000.000.000,- sampai dengan akhir tahun 2012 hanya mampu terealisasi sebesar Rp.1.269.203.702.854,- atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 63,46%. Belum optimalnya capaian kinerja indikator ini terkendala oleh beberapa faktor antara lain PMDN/PMA yang sudah mendapatkan izin investasi belum semua merealisasikan investasinya, masih minimnya infrastruktur seperti ketersediaan sumber daya energi listrik, tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP), masalah pertanahan dan belum teridentifikasi dan terinventarisir permasalahan di kabupaten/kota dalam pelaksanaan realisasi penanaman modal.

Dalam upaya peningkatan realisasi investasi PMDN/PMA, Pemerintah Aceh menetapkan beberapa kebijakan/strategis yaitu (1) melalui peningkatan

fasilitas penunjang penanaman modal; (2) penguatan perdamaian, stabilitas politik dan keamanan; (3) peningkatan kualitas pelayanan publik dan (4) kepastian hukum tentang kepemilikan tanah serta promosi potensi sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah Aceh.

j. Indikator kinerja "Persentase peningkatan nilai ekspor" ditargetkan 2%, realisasi sebesar 0,78%, dan persentase tingkat capaian sebesar 38,12%. Hal ini disebabkan karena nilai ekspor migas dan non migas mengalami penurunan.

Penurunan nilai ekspor migas disebabkan terus menurunnya persediaan minyak dan gas bumi selama tiga tahun terakhir, sedangkan non minyak dan gas bumi sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi pada nilai ekspor Aceh. Salah satu komoditi andalan ekspor non migas Aceh adalah komoditi pupuk, hal ini terkendala dengan adanya kebijakan tingkat nasional yang mengharuskan memenuhi kebutuhan pupuk dalam daerah terlebih dahulu sebelum di ekspor ke Negara tujuan.

Untuk meningkatkan nilai ekspor, Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa kebijakan/strategi antara lain melalui kerjasama dalam wadah IMT-GT yang telah disepakati mulai tahun 1991 sebagai wadah pengembangan ekonomi regional. Wadah ini dibentuk untuk memenuhi kompleksitas sumber daya yang dimiliki ketiga Negara sub wilayah ini yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand serta menetapkan Sabang sebagai pelabuhan bebas, Hubspot Internasional

untuk mendukung ekspor/impor Indonesia wilayah barat.

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahun lalu dengan tahun ini, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi indikator kinerja tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3%	3,20%	5,2%
2.	Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6%	6,5%	6,06%
3.	Persentase Pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	34,78 triliun	35,2 Triliun	36,60 Triliun
4.	Persentase Pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	30,80 triliun	32,8 Triliun	32,68 Triliun
5.	Persentase penurunan angka pengganguran terbuka	0,19%	1%	0,39%
6.	Persentase penurunan angka penduduk miskin	1,41%	2%	0,11%

Sumber : *LAKIP Pemerintah Aceh Tahun 2011 dan Realisasi Kinerja Tahun 2012*

Berdasarkan perbandingan terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja tahun 2011 dengan tingkat capaian kinerja tahun 2012 mengalami peningkatan, kecuali hanya 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum optimal yaitu persentase penurunan angka penduduk miskin yang ditargetkan penurunannya sebesar 2% hanya mampu diturunkan sebesar 0,11%, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan migas

Pemerintah Aceh tahun 2011 sebesar 3%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 meningkat menjadi 5,2% dari target 3,20%, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2011 mencapai 6%, pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,06% menjadi 6,06%.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, perkembangan pertumbuhan ekonomi migas dan non migas, Pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas dan Non Migas, dan Tingkat Penurunan Angka Penggangguran Terbuka dan Angka Penduduk Miskin disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi
dengan Migas dan Non Migas

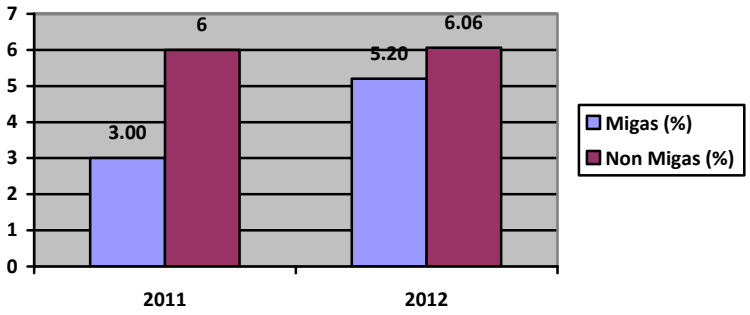

Grafik 3.2
Pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan
harga konstan dengan migas dan Non Migas

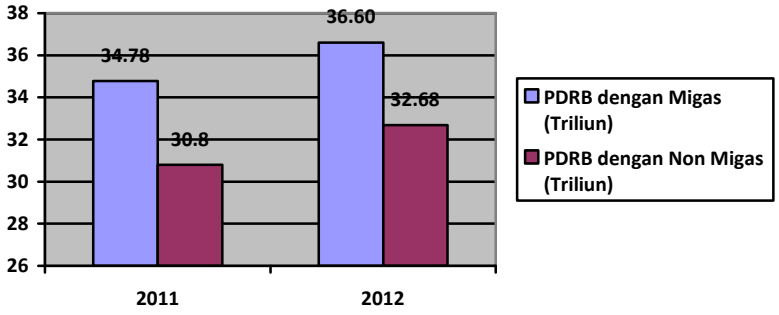

Grafik 3.3
Tingkat Penurunan Angka Pengganggguran Terbuka
dan Angka Penduduk Miskin

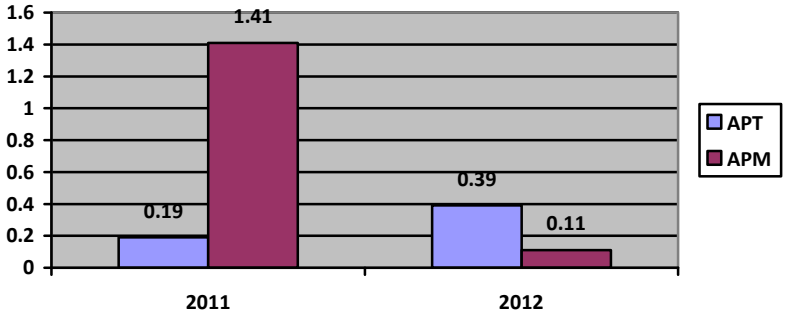

2. Sasaran Strategis kedua, "*Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja yang dapat dicapai pada akhir tahun 2012 dengan target kinerja, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik *)*	1.050	Km	494,81	47,12
2	Jumlah rumah sehat sederhana yang terbangun	869	Unit	914	105,18
3	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	80.000	M	63.152	78,94
4	Panjang jaringan distribusi air minum	110.000	M	99.296	90,27
5	Jumlah sarana dan prasarana pedesaan yang terbangun				
	a. Jalan dan Jembatan	110	Km	108	98,18
	b. Sarana dan Prasarana Gedung	95	Unit	105	110,53
	c. Sarana dan Prasarana Mesjid/ Meunasah	192	Unit	177	92,19
Rata-rata persentase capaian					**88,92**

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja dari sasaran strategis "*meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman*" sebagaimana dalam tabel 3.4, bahwa rata-rata persentase capaian pada tahun 2012 sebesar 88,92% dapat dikategorikan **Baik**. Namun demikian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum optimal yaitu indikator panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik, dengan tingkat capaiannya sebesar 47,12% dan indikator panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun dengan tingkat capaian sebesar 78,94%.

Belum optimalnya tingkat capaian kinerja kedua indikator kinerja tersebut antara lain disebabkan adanya penyesuaian/ rasionalisasi volume target kinerja terhadap perubahan alokasi anggaran dalam APBA-P Tahun 2012

yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja yang telah ditargetkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh.

Terhadap capaian kinerja yang melebihi target maupun yang belum mencapai target, Pemerintah Aceh akan mengambil kebijakan/strategi yang konkrit dan konstruktif pada tahun berikutnya yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 melalui program-program yang mendukung keberhasilan sasaran strategis ini.

Untuk mengetahui realisasi tahun lalu dengan tahun ini, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi indikator kinerja tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Panjang jaringan distribusi air minum	88.935 M	110.000 M	99.296 M
2.	Jumlah rumah sehat sederhana yang terbangun	806 Unit	869 Unit	914 Unit
3.	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	81.035 M	80.000 M	63.152 M

Pemerintah Aceh dari tahun ke tahun terus meningkatkan Pembangunan jaringan distribusi air minum untuk kebutuhan air bersih kepada masyarakat, pada tahun 2011 sepanjang 88.935 meter dan pada tahun 2012 sepanjang 99.296 meter.

Begitu juga terhadap pembangunan rumah sehat sederhana bagi masyarakat korban bencana dan dhuafa pada tahun 2011 realisasi pembangunannya sebanyak 806 unit, program dan kegiatan tersebut dilanjutkan pada

tahun 2012 dengan realisasi pembangunannya sebanyak 914 unit.

Sedangkan terhadap pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada tahun 2011 direalisasikan sepanjang 81.035 meter dan pada tahun 2012 dapat direalisasikan sepanjang 63.152 meter, berdasarkan perbandingan tersebut di atas, perkembangan panjang jaringan distribusi air minum, jumlah rumah sehat sederhana dan Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3.4
Panjang Jaringan Distribusi Air Minum

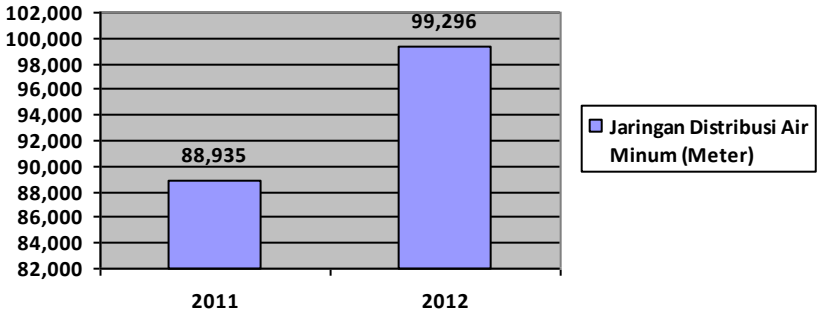

Grafik 3.5
Jumlah Rumah Sehat Sederhana

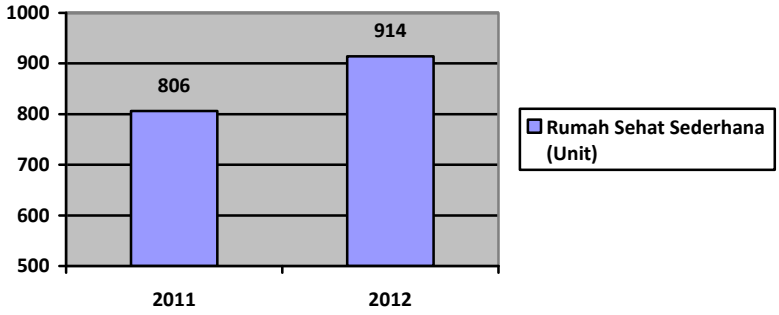

Grafik 3.6

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun

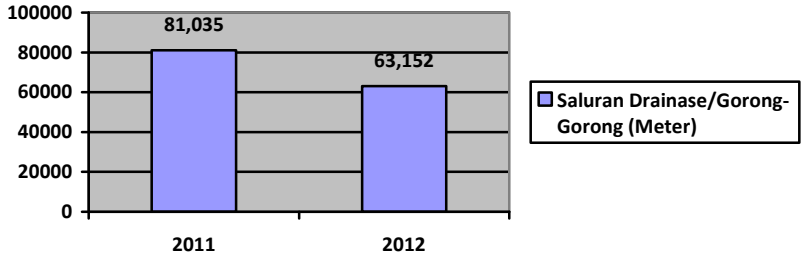

3. **Sasaran Strategis ketiga, "*Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai*".**

Sasaran strategis ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik *)*	45.000	Ha	148.931	330,96
2	Jumlah lokasi pembangunan pengaman pantai	36	Lokasi	68	188,89
3	Jumlah lokasi pembangunan pengendalian banjir	120	Lokasi	150	125,00
4	*Jumlah Waduk/embung yang berfungsi dengan baik *)*	6	Unit	6	100,00
Rata-rata persentase capaian					**186,21**

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi*

sungai", diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **186,21%** atau dikategorikan ***Sangat Baik,*** bahkan terdapat 3 (tiga) indikator yang melebihi target dan hanya 1 (satu) indikator yang tingkat capaiannya sesuai dengan target yaitu 100%. Pemerintah Aceh akan melanjutkan program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis ini.

Indikator kinerja Luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik	41.887 ha	45.000 ha	148.931 ha

Luas cakupan layanan irigasi dalam Provinsi Aceh bila dibandingkan dari tahun 2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan rencana 45.000 ha yang ditargetkan di tahun 2012 mampu direalisasikan seluas 148.931 ha. Peningkatan luas cakupan layanan irigasi tersebut sangat diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian di Aceh.

Berdasarkan perbandingan tersebut di atas, perkembangan panjang jaringan distribusi air minum, jumlah rumah sehat sederhana dan Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3.7
Perkembangan Luas Cakupan Layanan Irigasi
Dalam Kondisi Baik

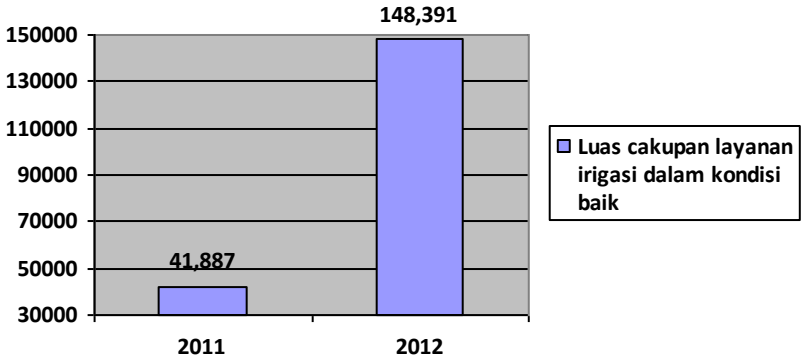

4. **Sasaran Strategis keempat, "*Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika*".**

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	Jumlah fasilitas perhubungan transportasi darat yang memenuhi standar pelayanan minimal	9	Unit Gedung PKB	8	88,89
		6	Traffic light	8	133,33
		1	Unit Zona Keselamatan	1	100,00
2	*Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan telematika *)*	10	%	10	100,00

3	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang kelancaran dan ketertiban distribusi Barang dan Penumpang	13	Unit Terminal Angkutan Barang/ Penumpang	20	153,85
		2	Unit Terminal Pelabuhan	7	350,00
		7	Unit Fasilitas Bandara	5	71,43
Rata-rata persentase capaian					**142,50**

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis "*Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika*" diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **142.50%** dengan kategori ***sangat baik***.

Tingkat capaian sasaran strategis ini didukung oleh tingkat capaian indikator jumlah fasilitas perhubungan transportasi darat yang memenuhi standar pelayanan minimal melalui pembangunan gedung PKB yang ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) unit, mampu terealisasi sebanyak 8 (delapan) unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,89 %, yang berlokasi di Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Besar, pembangunan *traffic light* yang ditargetkan sebanyak 6 (enam) unit dapat direalisasikan sebanyak 8 (delapan) unit atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 133,33%. pembangunan 8 (delapan) unit *Traffic light* tersebut berlokasi pada Simpang Dodik, Simpang Jam Kota Banda Aceh, di Kabupaten Aceh Timur, di Kabupaten Nagan Raya, di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Simeulue. Serta Pembangunan Zona Keselamatan Sekolah yang ditargetkan sebanyak 1 (satu) unit, dapat direalisasi

sebanyak 1 (satu) unit, atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %, yang berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.

Indikator kinerja "Pembangunam angkutan Barang/Penumpang" yang ditargetkan 13 Unit, dapat direalisasi sebanyak 20 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 153,85%. Sedangkan indikator "Pembangunan Terminal Pelabuhan" yang ditargetkan sebanyak 2 (dua) unit terminal pelabuhan, dapat direalisasi sebanyak 7 (tujuh) unit atau tingkat capaiannya sebesar 350% dan "Pembangunan Fasilitas Bandara" yang ditargetkan sebanyak 7 (tujuh) unit, mampu terealisasi sebanyak 5 (lima) unit, atau tingkat capaiannya sebesar 71,43 % .

5. Sasaran Strategis kelima, "*Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran setiap indikator sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan *)*	3	Jenis	2	66,67
2	Jumlah desa pada setiap Kabupaten/ Kota yang terpenuhi jaringan listrik belum terjangkau oleh PLN	13	Kab/Kota	8	61,54

3	Penurunan aktifitas pertambangan tanpa izin	10	%	5,4	54,00
4	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	1	%	1,36	136,00
5	Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB	0,5	%	0,56	112,00
6	Rasio desa ketersediaan air bersih dari sumber air tanah	7	%	8,80	125,71
7	Rasio Desa berlistrik	0.09	%	0,33	366,67
8	*Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik* ***)**	0.08	%	0,13	162,50
9	Jumlah penyediaan air bersih di daerah krisis air melalui pengeboran air tanah, penurapan mata air dan bak penampungan	48	lokasi	49	102,08
10	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI)	4	Kab/Kota	4	100,00
Rata-rata persentase capaian					128,72

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis "Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi" yang berkelanjutan diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **128,72%** dan dapat dikategorikan ***sangat baik***.

Meskipun rata-rata tingkat capaianya sangat baik namun terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum optimal, yaitu :

- Indikator Kinerja Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan yang ditargetkan sebanyak 3 jenis dan direalisasikan sebanyak 2 jenis dan persentase tingkat capaian sebesar 66,67%. Belum optimalnya capaian kinerja ini disebabkan Pengembangan Energi Alternatif Tenaga Uap (PLTU) belum dapat di realisasikan disebabkan pembangunan PLTU masih dalam tahap penyelesaian, sedangkan pengembangan energi alternatif PLTS dan PLTMH

sudah dapat dikembangkan yang berlokasi di Aceh Timur, Subulussalam, Aceh Besar, Gayo Luwes dan Aceh Tengah.

- Indikator kinerja "Jumlah desa pada setiap Kabupaten/ Kota yang terpenuhi jaringan listrik belum terjangkau oleh PLN" ditargetkan sebanyak 13 Kab/Kota hanya terealisasi sebanyak 8 kab/kota dengan persentase tingkat capaian sebesar 61,54%. Belum optimalnya capaian kinerja ini disebabkan letak geografis wilayah Aceh sebagai daerah pergunungan dan kepulauan yang menyebabkan rentang pemenuhan jaringan listrik oleh PLN untuk pedesaan/dusun belum dapat terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Aceh menempuh kebijakan/strategi dengan mengembangkan pembangkit listrik PLTS dan PLTMH didaerah kepulauan dan perdesaan yang sulit dijangkau oleh PLN.
- Indikator kinerja "Penurunan aktifitas pertambangan tanpa izin" yang ditargetkan sebesar 10%, terealisasi sebesar 5,4% dan persentase tingkat capaian sebesar 54%. Belum optimalnya capaian kinerja ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin pertambangan, sehingga kegiatan pertambangan masih dilakukan secara ilegal. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota untuk mengurangi PETI melakukan beberapa kebijakan/strategi antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penertiban PETI, serta mempermudah kepengurusan izin pertambangan rakyat melalui pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu baik di tingkat Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kab/Kota.

Untuk mengetahui realisasi tahun lalu dengan tahun ini, maka dilakukan perbandingan terhadap indikator Jumlah pengembangan energi alternatif/terbarukan dan Jumlah penyediaan air bersih di daerah krisis air melalui pengeboran air tanah, penurapan mata air dan bak penampungan, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah pengembangan energi alternatif/terbarukan	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis
2.	Jumlah penyediaan air bersih di daerah krisis air melalui pengeboran air tanah, penurapan mata air dan bak penampungan	22 lokasi	48 Lokasi	49 lokasi

Berdasarkan perbandingan tersebut, pada tahun 2011 Pemerintah Aceh telah berhasil mengembangkan energi alternatif/terbarukan pada 3 (tiga) jenis, upaya tersebut terus dilakukan pada tahun 2012 dengan menargetkan pengembangan energi alternatif/ terbarukan sebanyak 3 (tiga) jenis, hanya mampu direalisasikan sebanyak 2 (dua) jenis.

Upaya pengembangan energi alternatif/terbarukan dalam memenuhi kebutuhan sumber energi terus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui program pengembangan dan pemanfaatan energi, program pemanfaatan sumber daya geologi dan mineral, program pengelolaan minyak dan gas bumi.

6. **Sasaran Strategis keenam, "*Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup*".**

Sasaran strategis ini ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Jumlah kota yang mendapat penghargaan lingkungan *)*	5	Kota	2	40,00
2	Jumlah sekolah/dayah/pesantren yang mendapat penghargaan lingkungan	6	Sekolah	7	116,67
3	Jumlah perusahaan/instansi/jasa yang sudah mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen yang dimiliki	21	Perusahaan	18	85,71
4	Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi/polusi	4	Industri	7	175,00
5	Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai RTH	3	Kab/Kota	4	133,33
6	Jumlah desa yang dijadikan model dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan	1	Desa	1	100,00
7	Jlh kasus pengaduan pengelolaan limbah industri yg ditindaklanjuti	3	Kasus	4	133,33
8	*Jumlah kawasan konservasi sumber daya alam yang dilindungi *)*	6	Lokasi	6	100,00
Rata-rata Persentase Capaian					110,51

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis *menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup*, dapat diperoleh capaian sebesar 110,51% atau tergolong ***sangat baik***. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja, bahkan terdapat 5 (lima) indikator yang melebihi target, serta 2 (dua) indikator kinerja mencapai target 100%, dan 1 (satu) indikator tingkat capaiannya belum optimal yaitu :

- *Jumlah kota yang mendapat penghargaan lingkungan yang ditargetkan 5 Kota , hanya mampu direalisasikan 2 kota* dengan persentase tingkat capaian sebesar 40%. Rendahnya tingkat capaian ini disebabkan 3 (tiga) Kab/Kota yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan lingkungan belum memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai dari LPD/LPND yang dibentuk oleh pemerintah.

Terhadap target capaian yang melebihi maupun yang belum mencapai, Pemerintah Aceh akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui beberapa strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Untuk mengetahui realisasi tahun lalu dengan tahun ini, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi indikator Perkembangan Jumlah perusahaan/ instansi/jasa yang sudah mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen yang dimiliki dan Jumlah Kabupaten/ Kota yang sudah mempunyai RTH, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah perusahaan/ instansi/ jasa yang sudah mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen yang dimiliki	16 perusahaan	21 Perusahaan	18 Perusahaan
2.	Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai RTH	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota

Dari tabel tersebut di atas, perbandingan Jumlah perusahaan/ instansi/ jasa yang sudah mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen yang dimiliki pada tahun 2011 sebanyak 16 perusahaan, mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 18 perusahaan, sedangkan Kabupaten/ Kota yang sudah mempunyai Ruang Terbuka Hijau mengalami peningkatan 4 (empat) Kabupaten/ Kota dibandingkan dengan tahun 2011 hanya 3 (tiga) Kabupaten/ Kota dari target sebanyak 16 Kabupaten/ Kota.

7. Sasaran Strategis ketujuh, "*Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.13, berikut :

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Tingkat angka kelulusan SD/MI *)*	99	%	99	100,00
2	*Tingkat angka kelulusan SMP/MTs *)*	95	%	99,39	100,39
3	*Tingkat angka kelulusan SMA/MA *)*	89	%	98,88	99,88
4	Tingkat angka kelulusan SMK	85	%	78,61%	79,40
5	Persentase penurunan jumlah penduduk buta aksara penduduk usia produktif 15-44 tahun	2.85	%	1,52%	53,33
Rata-rata persentase capaian					86,60

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis ”Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan” dapat diperoleh capaian sebesar 86,60% atau tergolong ***Baik***. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Meskipun Persentase tingkat capaian tergolong baik, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum optimal, yaitu :

- indikator kinerja Persentase penurunan jumlah penduduk buta aksara penduduk usia produktif 15-44 tahun yang pesentase capaiannya masih belum optimal yang ditargetkan sebesar 2,85%, hanya mampu dicapai sebesar 1,52% atau dengan tingkat capaian sebesar 53,33%. Rendahnya tingkat capaian ini didominasi penduduk pedesaan dan daerah kepulauan memerlukan adanya program/kegiatan khusus dalam bentuk paket A, paket b dan paket C, serta pendidikan kelompok masyarakat termasuk kesempatan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Terhadap target capaian yang belum mencapai, Pemerintah Aceh akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui beberapa strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya yang dituangkan dalam RPJMA tahun 2012-2017, antara lain pendidikan sumber daya manusia yang memenuhi Kualifikasi Keahlian Naional Indonesia (KKNI) melalui pendidikan vokasional dan kewirausahaan (*enterpreneurship*) pada pendidikan formal dan non formal, dan peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian MDGs.

8. Sasaran Strategis kedelapan, "*Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.14, berikut :

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	Rata-rata nilai UN SMP/MTs *)	7.31	Nilai	7,80	106,7
2	Rata-rata nilai UN SMA/MA *)	7.40	Nilai	7,70	104,00
3	Rata-rata nilai UN SMK	7.00	Nilai	7,41	105,85
4	Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	22	Sekolah	28	127,27
5	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/D4 sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				
	a. SD/MI	40	%	29	72,50
	b. SMP/MTs	60	%	75	125,00
	c. SMA/MA/SMK	85	%	91	107,06

6	Jumlah masyarakat Aceh yang mendapat bantuan biaya pendidikan (S-1, S-2 dan S-3) dalam dan luar negeri	8.127	Orang	9.425	115,97
Rata-rata persentase capaian					108,04

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 6 (enam) indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan diperoleh rata-rata capaian sebesar **108,04%** atau tergolong ***Sangat Baik***.

Terhadap capaian yang sudah melebihi dan belum mencapai target, Pemerintah Aceh akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui beberapa strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

Untuk mengetahui realisasi tahun lalu dengan tahun ini, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun 2012 terhadap indikator Perkembangan Rata-rata nilai UN SMP/MTs dan UN SMA/MA, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	103,94	100,00	106,70
2.	Rata-rata nilai UN SMA/MA	100,81	100,00	107,97

Capaian indikator kinerja rata-rata nilai UN SMP/MTs dari 103,94% pada tahun 2011 meningkat menjadi 106,70% pada tahun 2012, dan rata-rata nilai UN SMA/MA pada tahun 2011 mencapai 100,81%, meningkat menjadi 107,97% pada tahun 2012.

Berdasarkan perbandingan di atas, secara rinci perkembangan nilai rata-rata UN untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA dapat disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.8

Rata-rata nilai UN SMP/MTs dan SMA/MA

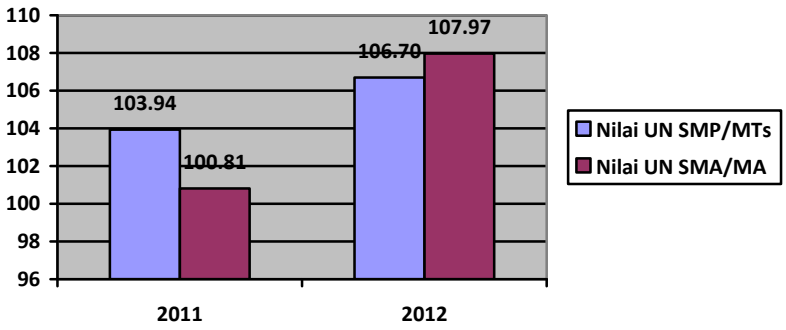

9. Sasaran Strategis kesembilan, "*Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 13 indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaiannya setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	Tingkat pelayanan kesehatan sesuai SPM	90	%	90	100,00
2	Tersedianya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)	4,359,791	Jiwa	4,359,791	100,00
3	*Rasio angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup *)*	16	per 1000 LH	9	143,75
4	*Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup *)*	118	per 100.000 LH	192	37,29
5	*Angka Usia Harapan Hidup (AHH) *)*	68,8	Tahun	68,8	100,00
6	Angka kesakitan malaria	1.09	per mil	0,65	59,63
7	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +	92	%	99	107,61
8	Angka Acute Flasid Paralysis (AFP) pada anak usia <15 tahun	4.96	per 100.000 anak	4,3	86,69
9	Angka kesakitan Demam berdarah Dengue (DBD)	57	per 100.000 penduduk	51	89,47
10	Presentase Balita dengan Gizi Buruk	0,3	%	0,10	33,33
11	Jumlah pasien kesehatan jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas)	3,390	Pasien	4.324	127,40
12	Jumlah Pasien Jiwa yang bebas Pasung	20	Pasien Pasung	22	110,00
13	Jumlah pemulangan pasien (dropping) kesehatan jiwa	200	Pasien	95	47,50
Rata-rata persentase capaian					87,89

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran dari 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada tahun 2012 rata-rata persentase capaian sebesar 87,89% atau dapat dikategorikan **Baik.** Namun demikian dari 13

indikator kinerja tersebut terdapat 4 (empat) indikator kinerja tingkat capaiannya belum optimal, yaitu :

- Indikator Rasio angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, yang ditargetkan sebanyak 118 per 100.000 LH hanya dapat direalisasikan sebanyak 192 per 100.000 LH dengan persentase tingkat capaian sebesar 37,29%. Rendahnya tingkat capaian ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil, keadaan sosial ekonomi keluarga, serta penempatan tenaga medis yang masih belum menjangkau wilayah-wilayah pedalaman dalam provinsi Aceh. Untuk meminimalisir angka kematian ibu melahirkan, Pemerintah Aceh telah mengambil kebijakan melalui pemerataan sarana dan prasarana kesehatan pada wilayah-wilayah pedalaman/ terpencil, meningkatkan peran tenaga medis di daerah-daerah terpencil.
- Indikator Angka kesakitan malaria, yang ditargetkan sebesar 1,09 per mil mampu direalisasikan sebesar 0,65 per mil dengan persentase tingkat capaian sebesar 59,63%. Belum optimalnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kualitas sanitasi lingkungan terutama di daerah-daerah pedalaman dan daerah kepulauan serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kelambu yang berinsektisida (*insectisida treated need*).

  Aspek pelayanan umum bidang kesehatan difokuskan pada aspek fasilitasi pelayanan dan tenaga kesehatan yang telah tersedia, kondisi mutu pelayanan

kesehatan yang diterima oleh masyarakat, pembiayaan dan efisiensi pelayanan kesehatan serta aspek pemberdayaan masyarakat.

- Indikator Presentase Balita dengan Gizi Buruk, yang ditargetkan sebesar 0,3%, hanya mampu direalisasikan sebesar 0,01 %, dengan persentase tingkat capaian sebesar 33,33%. Rendahnya tingkat capaian ini terutama disebabkan keadaan ekonomi yang lemah, sanitasi yang kurang baik yang dapat berimbas pada kondisi kesehatan anggota keluarga terutama pada anak, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga tidak mampu untuk menyediakan jumlah gizi yang dibutuhkan anak.
- Indikator jumlah pemulangan pasien (dropping) kesehatan jiwa yang ditargetkan sebanyak 200 pasien, hanya mampu direalisasikan sebanyak 95 pasien, dengan persentase tingkat capaian sebesar 47,50%. Rendahnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan keluarga terhadap penanggulangan pasien gangguan jiwa dan NAPZA. Untuk memaksimalkan jumlah pasien drooping, Penrintah Aceh telah mengambil kebijakan/strategi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan keluarga melalui penyuluhan dan pembinaan lebih lanjut terhadap pasien yang sudah dianggap sembuh menurut medis.

Untuk mengetahui capaian kinerja dua tahun terakhir dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun 2012 terhadap

indikator Tingkat pelayanan kesehatan sesuai SPM, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), Rasio angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup dan Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 dan target RPJMA 2007-2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian RPJMA 2007-2012
1.	Tingkat pelayanan kesehatan sesuai SPM	85%	90%	95%
2.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	68,8 tahun	68,8 tahun	70 Tahun
3.	Rasio angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	16,3 per 1000 LH	9 per 1000 LH	15 per 1000 LH
4.	Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	119 per 100.000 LH	192 per 100.000 LH	125 per 100.000 LH

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat pelayanan kesehatan sesuai SPM, pada tahun 2011 sebesar 85% meningkat menjadi 90% pada Tahun 2012, tingkat capaian tersebut belum dapat terpenuhi sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMA 2007-2012 sebesar 95%.

Sedangkan Indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2012 terealisasi 68,8 tahun, tingkat capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMA 2007-2012 rata-rata usia harapan hidup penduduk Aceh sebesar 70 tahun.

Indikator kinerja Rasio angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012, mengalami perubahan dari tahun 2011 menjadi 9 per 1000 LH. Angka tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMA 2007-2012 sebesar 15 per 1000 LH. Berdasarkan perbandingan tersebut, perkembangan angka kematian bayi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.9
Perkembangan Angka Kematian Bayi

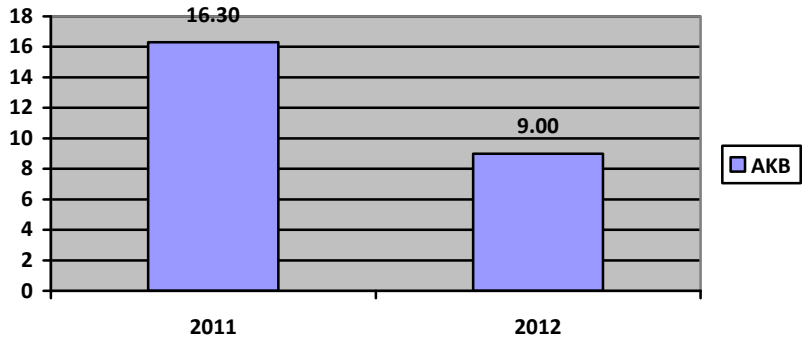

Sedangkan Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, pengalami penurunan dari 119 per 100.000 LH pada tahun 2011 menjadi 192 per 100.000 LH pada tahun 2012, tingkat capaian tersebut belum memenuhi sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMA 2007-2012 yaitu sebesar 125 per 100.000 LH.

10. Sasaran Strategis kesepuluh, "*Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagaimana ini disajikan dalam tabel 3.18 berikut :

Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam.

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Penanganan pelanggaran syariat Islam *)*	150	Kasus	98	65,33
2	*Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) *)*	7 triliun	Rupiah	10.530.000.000	150,43

3	Jumlah produk makanan, Obat-obatan dan Kosmetika mendapat sertifikasi Halal	10	Produk	6	60,00
4	Jumlah Fatwa Ulama, himbauan, seruan dan Taushiyah yang diterbit	19	dokumen	8	42,11
5	persentase penurunan kasus pelanggaran Qanun dan Pergub	18	%	10	56,00
6	persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12	%	9	75,00
7	rasio penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam di Mahkamah Syariah dengan jumlah kasus yang ditangani	20	%	20	100,00
8	Jumlah gampong percontohan bersyariat Islam	2	Gampong	2	100,00
9	Advokasi terhadap Qanun, Pergub, Kepgub Syariat Islam	250	Kasus	213	85,00
10	Jumlah Qari-Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	98	Orang	98	100,00
11	Jumlah Ran Qanun Bidang Syariat Islam yang disusun	2	Ran Qanun	2	100,00
12	Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150	Orang	150	100,00
13	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas Imeum Mesjid, Imeum Meunasah dan Remaja Mesjid dalam pelaksanaan syariat Islam	446	Orang	600	134,53
Rata-rata persentase capaian					89,88

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran dari 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam pada tahun 2012 rata-rata persentase capaian sebesar 89,88% atau dapat dikategorikan **Baik.** Namun demikian dari 13 indikator kinerja tersebut, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang tingkat capaiannya sudah mencapai target, dan

terdapat 4 (empat) indikator kinerja lainnya yang belum optimal, keempat indikator kinerja tersebut antara lain :

- Indikator kinerja Penanganan pelanggaran syariat Islam dengan target 150 kasus, hanya mampu terealisasi sebanyak 98 kasus dengan persentase tingkat capaian sebesar 65,33%. Belum optimalnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan terdapat beberapa kasus yang penyelesaiannya dilaksanakan secara damai oleh pihak yang bertikai tanpa dilanjutkan ke pihak Pengadilan Mahkamah Syariah.
- Indikator kinerja jumlah produk makanan, Obat-obatan dan Kosmetika mendapat sertifikasi Halal dengan target 10 produk, hanya mampu terealisasikan 6 produk dengan persentase tingkat capaian sebesar 60 %. Rendahnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan belum tersedia tenaga analis sehingga untuk melakukan pengujian obat-obatan dan kosmetika harus bekerjasama dengan Balai POM dan akademisi dari Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Aceh akan mengupayakan memenuhi kebutuhan tenaga analis yang setiap saat dapat mengoptimalkan pengujian untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan memanfaatkan laboratorium yang telah tersedia pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- Indikator kinerja jumlah Fatwa Ulama, himbauan, seruan dan Taushiyah yang diterbit dengan target 19 dokumen, hanya terealisasikan 8 dokumen dengan persentase tingkat capaian sebesar 42,11%. Tidak tercapianya target ini disebabkan karena fatwa, himbauan, seruan dan taushiyah tergantung kepada

permasalahan yang memerlukan penetapan fatwa ulama, seruan dan taushiyah pada tahun 2012 hanya sebanyak 8 dokumen.

- Indikator kinerja persentase penurunan kasus pelanggaran Qanun dan Peraturan Gubernur dengan target 18%, hanya terealisasi 10 % atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 56%. Belum optimalnya capaian ini disebabkan karena pelanggaran Qanun dan Peraturan Gubernur pada tahun 2012 yang memerlukan penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan Peraturan Gubernur yang timbul.

Terhadap capaian kinerja yang berhasil secara optimal dan yang belum dapat tercapai, Pemerintah Aceh tetap melakukan langkah-langkah konkrit melalui program dan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Untuk mengetahui capaian kinerja dua tahun terakhir dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun 2012 terhadap indikator Penanganan Syariat Islam dan Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS), sebagaimana terlihat dalam tabel 3.19 di bawah ini :

Tabel 3.19
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Penanganan pelanggaran syariat Islam	160 kasus	150 kasus	98 kasus
2.	Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS)	4.400.000.000	7,000,000,000	10.530.000.000

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam, Pemerintah Aceh telah mengupayakan pelaksanaan Syariat Islam secara komprehensif dengan melakaukan upaya berupa penanganan pelanggaran syariat Islam, yang pada tahun 2011 telah berhasil dilakukan penyelesaian terhadap 160 kasus yang terjadi. Upaya tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dimana pada tahun 2012 telah menargetkan penanaganan pelanggaran Syariat Islam sebanyak 150 kasus, dan hingga akhir tahun anggaran hanya mampu direalisasikan penyelesaiananya sebanyak 98 kasus. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga disambut baik oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, penerimaan ZIS di Aceh mencapai Rp. 4.400.000.000. Pada tahun 2012, Penerimaan ZIS ditargetkan sebesar Rp. 7.000.000.000, dan sampai akhir tahun mampu direalisasikan sebesar Rp. 10.530.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar 139,32%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Syariat Islam mendapat antusiasme dari masyarakat Aceh. Upaya pelaksanaan Syariat Islam di “Bumi Serambi Mekkah” terus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui beberapa program, salah satunya program Peningkatan ZIS dan Pembinaan Kelembagaan.

11. Sasaran Strategis kesebelas, "*Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel 3.20
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial.

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *)*	2.312	Orang	8.603 orang	372,10
2	Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhab untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kaum dhuafa	364	Unit	159 unit	43,68
3	Jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	7.171	Orang	7.151 orang	99,72
Rata-rata persentase capaian					171,83

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **171,83%.** Pencapaian kinerja ini tergolong **sangat baik**. Namun demikian, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasi tingkat capaiannya masih berada dibawah target, yaitu jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhab untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kaum dhuafa yang mampu direalisasikan sebanyak 159 unit dari target sebanyak 364 unit. Realisasi pencapaian yang tidak mencapai target disebabkan adanya perubahan kebijakan

anggaran yang berimbas pada pergeseran alokasi anggaran untuk pembangunan/rehab rumah layak huni kepada KAT dan kaum dhuafa yang dialihkan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat capaian indikator penanganan PMKS mencapai 372,1%.

Terhadap indikator kinerja yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, Pemerintah Aceh akan mengambil langkah perbaikan melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Untuk mengetahui capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun 2012 terhadap indikator Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Soaial, Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhab untuk Komunitas Adata Terpencil (KAT) dan indikator jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.21 di bawah ini.

Tabel 3.21
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.145 orang	2.312 orang	8.603 orang
2.	Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhab untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kaum dhuafa	3.082 unit	364 unit	159 unit
3.	Jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	8.324 orang	7.171 orang	7.161 orang

Tingkat capaian indikator kinerja jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami peningkatan signifikan, dari 2.145 orang pada tahun 2011 menjadi 8.603 orang pada tahun 2012. Sedangkan tingkat capaian indikator kinerja jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhab untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan indikator kinerja jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial pada tahun 2012 mengalami penurunan.

Dari perbandingan terhadap indikator jumlah penanganan PMKS dan Jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, perkembangan pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.10
Penanganan PMKS dan Perlindungan Anak

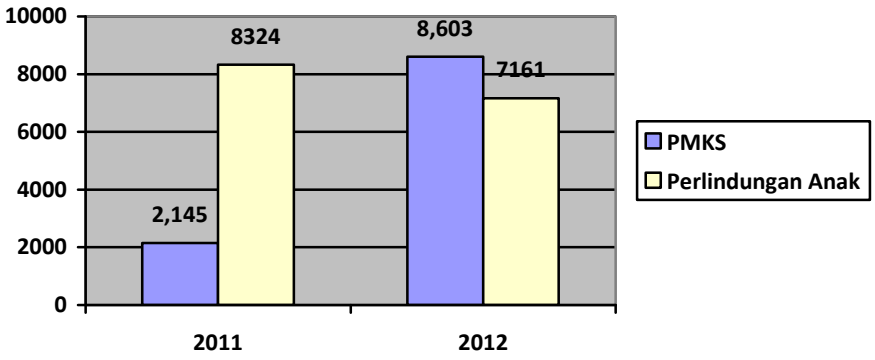

12. Sasaran Strategis kedua belas, "*Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat.

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh *)*	29.400	Orang	28.993	98,62
2	*Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh *)*	997.620	Orang	1.026.800	102,92
3	Jumlah pengembangan objek pariwisata	20	Objek	31	155,00
4	Persentase penyelesaian kasus perselisihan Adat	50	%	86	172,00
Rata-rata persentase capaian					**132,14**

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran dari 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 132,14% atau pencapaian kinerja ini tergolong ***sangat baik***.

Untuk mengetahui capaian kinerja dua tahun terakhir dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun 2012 terhadap indikator Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh, Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh dan indikator Jumlah pengembangan objek pariwisata sebagaimana terlihat dalam tabel 3.23 berikut ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	28.053 orang	29.400 orang	28.993 orang
2.	Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	959.146 orang	997.620 orang	1.026.800 orang
3.	Jumlah pengembangan objek pariwisata	17 objek	20 objek	31 objek

Berdasarkan tabel di atas, dari 3 (tiga) indikator kinerja hanya 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target sesuai dengan rencana yaitu jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh, yaitu 100,19% di tahun 2011 dan 98,62% ditahun 2012. Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja lainnya mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang sangat signifikan.

Dari perbandingan terhadap indikator kinerja kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.11
Grafik Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Domestik

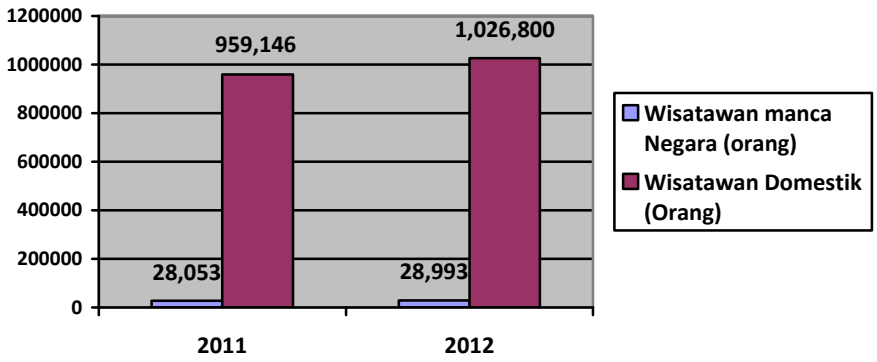

13. Sasaran Strategis ketiga belas, "*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien*".

Sasaran strategis ini ditetapkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.24 berikut :

Tabel 3.24
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien.

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ ditetapkan *)*	790	Dokumen	973	123,16
	a. Keputusan Gubernur	*700*	*Dokumen*	*864*	*123,43*
	b. Peraturan Gubernur	*80*	*Dokumen*	*94*	*117,5*
	c. Qanun	*10*	*Dokumen*	*15*	*150*
2	Jumlah gugatan terhadap pemerintah daerah yang diselesaikan	5	Kasus	5	100,00
3	*Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan *)*	190	LHP	170	89,47
4	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	35	Kasus	37	105,71
5	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%	100	100,00
6	Persentase kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	86	%	86	100,00

7	Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	10.91	%	10,32	94,59
8	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh *)*	10	%	13,03	130,30
9	Jumlah Unit Layanan yang telah memiliki Standart Operational Prosedur (SOP) berstandart International	2	Unit	1	50,00
10	Jumlah penggunaan aplikasi pendukung E-gov Pemerintah Aceh untuk pemenuhan pelayanan informasi publik	7	Aplikasi	4	57,00
11	Persentase Peningkatan Asset Milik Pemerintah Aceh yang digunausahakan	85	%	85	100,00
12	*Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat *)*	100	%	100	100,00
13	Jumlah penerbitan dokumen izin dan non izin	9.346	Dokumen	5.883	62,95
14	Persentase penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	100,00
15	Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	77.67	%	76,77	98,84
16	Persentase tingkat kehadiran Aparatur dalam peningkatan disiplin	100	%	98	98,00

17	Persentase aparatur yang mengikuti diklat struktural dan teknis/fungsional	15	%	15	100,00
Rata-rata persentase capaian					94,71

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 94,71% atau pencapaian kinerja ini tergolong ***baik***. Meskipun tingkat capaian rata-rata sasaran strategis ini tergolong baik, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tingkat capaiannnya belum optimal, yaitu :

- Indikator Jumlah Unit Layanan yang telah memiliki Standart Operational Prosedur (SOP) berstandart International, yang ditargetkan sebanyak 2 unit, hanya mampu direalisasikan sebanyak 1 unit atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 50%. Belum optimalnya capaian kinerja ini disebabkan 1 (satu) unit layanan yang dipersiapkan untuk memiliki SOP berstandar internasional sampai dengan akhir tahun 2012 belum mendapat pengakuan dari *stakeholder*/lembaga terkait.
- Indikator penggunaan aplikasi pendukung E-gov Pemerintah Aceh untuk pemenuhan pelayanan informasi publik yang ditargetkan sebanyak 7 aplikasi, hanya mampu direalisasikan sebanyak 4 aplikasi dengan persentase tingkat capaian sebesar 57%. Hal ini disebabkan keterbatasan perangkat lunak (*soft ware*) dan sumber daya manusia yang menenuhi kompetensi yang diperlukan.

- Indikator jumlah penerbitan dokumen izin dan non izin, dengan target 9.346 dokumen, hanya mampu terealisasi sebanyak 5.883 dokumen atau persentase tingkat capaian sebesar 62,95%. Rendahnya tingkat capaian in idisebabkan adanya kebijakan dari Gubernur untuk mengevaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan, sehingga untuk sementara waktu, terdapat beberapa jenis izin tidak dikeluarkan/ diterbitkan, diantaranya sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Untuk mengetahui capaian kinerja dua tahun terakhir, melakukan perbandingan antara tingkat realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun 2012 terhadap indikator Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ditetapkan, Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, Persentase kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA, dan Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat sebagaimana terlihat dalam tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 terhadap beberapa Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ ditetapkan	806	790	973
2.	Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	136 LHP	190 LHP	170 LHP
3.	Persentase kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	83%	86%	86%
4.	Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh (PAA) terhadap APBA	10,84%	10,91%	10,32%
5.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	85,71%	100%	100%

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, yang merupakan program prioritas Pemerintah Aceh, yang dilaksanakan melalui penetapan regulasi, tindak lanjut temuan dan pengawasan, penyesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur, peningkatan kontribusi PAA terhadap APBA serta penyelesaian pengaduan masyarakat setiap tahun terus ditingkatkan sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut di atas.

14. Sasaran Strategis keempat belas, "*Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana*".

Untuk mengukur rata-rata tingkat keberhasilan Sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase penanganan dan pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana dan Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, hasil pengukuran setiap indikator tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel 3.26 dibawah ini :

Tabel 3.26
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana.

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	*Persentase penanganan dan pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana *)*	25	%	20,83	83,3
2	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	75	%	60,1	80,1
Rata-rata persentase capaian					81.70

*) = Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar 81,70% atau kategori ***Baik***.

Untuk mengetahui capaian kinerja dua tahun terakhir melakukan perbandingan antara tingkat realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun 2012 terhadap indikator persentase pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana sebagaimana terlihat dalam tabel 3.27 berikut ini.

Tabel 3.27
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja
Tahun 2011 dan Tahun 2012 terhadap Persentase pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Persentase pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana	80,00%	25%	83,3%

Berdasarkan perbandingan indikator persentase pengurangan resiko bencana Kab/Kota rawan bencana, pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011, dari 80,00% menjadi 83,3%. Namun demikian dalam upaya pengurangan resiko bencana serta rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, Pemerintah Aceh melakukan program/ kebijakan dalam penanggulangan kebencanaan, antara lain melalui program penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, program tanggap darurat penanggulangan bencana dan program rehabilitasi dan rekontruksi bencana.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan Nota Kesepakatan Nomor 15/MOU/2011/900/ 2423/DPRA/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) Tahun 2012.

Berdasarkan KUA-APBA Tahun 2012, Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan pembahasan kebijakan dan program/kegiatan yang menjadi prioritas pelaksanaan Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Aceh	Rp.	804.284.999.424,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.972.238.391.377,-
c. Dana Otonomi Khusus	Rp.	5.476.288.764.000,-
d. Lain-lain pendapatan yang Sah	Rp.	461.996.170.000,-
Jumlah Pendapatan	**Rp.**	**8.714.808.324.801,-**

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja pegawai	Rp.	88.419.643.309,-
2) Belanja bunga	Rp.	0,-
3) Belanja subsidi	Rp.	0,-
4) Belanja hibah	Rp.	1.146.032.548.668,-
5) Belanja bantuan sosial	Rp.	594.341.157.494,-
6) Belanja bagi hasil	Rp.	271.000.000.000,-
7) Belanja bantuan keuangan	Rp.	597.119.000.000,-
8) Belanja tidak terduga	Rp.	150.000.000.000,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	325.975.208.462,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.538.991.461.352,-
3) Belanja Modal	Rp.	1.000.059.634.516,-
Jumlah Belanja	**Rp.**	**9.511.938.653.801,-**

3. Pembiayaan

1) Penerimaan	Rp.804.130.329.000,-
2) Pengeluaran	Rp. 7.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan	**Rp.797.130.329.000,-**

Sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Daerah pada Juni 2012, arah kebijakan pembangunan Aceh yang telah ditetapkan tersebut, yang mengacu pada visi dan misi Gubernur terpilih, sehingga perlu dilakukan perubahan APBA tahun 2012 untuk :

1. Penyesuaian kembali prioritas program/kegiatan berdasarkan tuntutan kondisi eksisting dan mendesak, termasuk penyesuaian sasaran, lokasi dan pagu kegiatan.
2. Penyelesaian program tanggap darurat, bencana alam yang sudah selesai dikerjakan, namun belum dianggarkan.
3. Menyesuaikan kembali target pencapaian sasaran berdasarkan pertimbangan.
4. Penyesuaian/pergeseran kegiatan antar kode belanja
5. Pembayaran kekurangan gaji/tunjangan/operasional
6. Penyelesaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan, namun belum dapat dibayar.

Pemerintah Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan perubahan KU-APBA Tahun 2012 yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Nomor : 84/PKS/2012, 910/2835/DPRA/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA-P APBA) Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan kesepakatan (KUA-P APBA) Tahun Anggaran 2012, ditetapkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tahun anggaran 2012 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2012 sebesar **Rp.9.711.938.653.801,-**.

Sesuai dengan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tahun 2012, anggaran pendapatan berjumlah **Rp.8.683.092.406.384,-** terdiri dari Pendapatan Asli Aceh, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Lain-lain pendapatan Aceh yang sah, sedangkan pendapatan dari Penerimaan Pembiayaan Aceh sebesar **Rp.1.035.846.247.417,-**.

Secara lebih terinci rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel 3.28 di bawah ini :

Tabel. 3.28
Realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh tahun 2012

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ACEH			
1.	Pendapatan Asli Aceh	804.284.999.424	903.626.641.051,81	112,35%
2.	Dana Perimbangan	1.940.522.472.960	2.359.784.326.817,00	121,60%
3.	Dana Otonomi Khusus	5.476.288.764.000	5.476.288.764.000,00	100%
4.	Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah	461.996.170.000	442.349.581.000,00	95,75%
	Jumlah	*8.683.092.406.384*	*9.182.049.312.868,81*	105,75%
	PEMBIAYAAN ACEH			
1.	Penerimaan Pembiayaan Aceh	1.035.846.247.417	1.508.840.608.851,30	146%
2.	Pengeluaran Pembiayaan Aceh	7.000.000.000	0,00	0%
	Jumlah	*1.028.846.247.417*	*1.508.840.608.851,30*	146%

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran pendapatan Aceh menunjukkan tingkat capaian yang optimal, karena secara keseluruhan realisasi anggaran pendapatan mencapai sebesar **Rp.9.182.049.312.868,81** atau meningkat sebesar 105,75% dari target yang direncanakan sebesar **Rp.8.683.092.406.384,00,-**.

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan Aceh tahun 2012, realisasi anggaran belanja Aceh yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung dapat dilihat dari tabel 3.29 berikut ini :

Tabel. 3.29
Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2012

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Tidak Langsung	3.712.038.651.158	3.498.380.620.193	91,82%
2.	Belanja Langsung	5.999.900.002.643	5.348.941.314.859	89,15%
Jumlah		*9.711.938.653.801*	*8.757.321.935.052*	90,17%

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, 2012

Sedangkan komposisi Anggaran Belanja Aceh tahun 2012 yang berjumlah **Rp. 9.711.938.653.801** terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar **Rp.3.712.038.651.158,-.** Sedangkan untuk Belanja Langsung yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 5.999.900.002.643,-.**

Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tersebut, setiap tahun menunjukkan adanya peningkatan, dalam kurun waktu tahun 2007-2012, hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.30 berikut :

Tabel 3.30
Jumlah dan realisasi APBA dalam kurun waktu 2007-2012

No.	Tahun	APBA		Persentase
		Jumlah	Realisasi	
1.	2007	4.047.191.176.763	3.137.549.129.538	77,52
2.	2008	8.518.740.595.768	5.717.033.405.616	67,11
3.	2009	9.791.344.121.604	7.652.107.427.194	78,15
4.	2010	8.246.389.494.167	7.532.616.309.216	91,34
5.	2011	7.979.778.571.000	7.374.632.649.255	92,42
6.	2012	9.711.938.653.801	8.757.321.935.052	90,17
Jumlah		**48.295.382.613.103**	**40.171.260.855.871**	**83,18**

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Januari 2013

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk tahun 2012 kemampuan daya serap APBA mencapai **90,17%**. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yaitu sebesar **115,62%**. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh menjadi lebih efisien sebesar **25,45%** dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan/ penganggaran yang berbasis kinerja.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh tahun 2012 merupakan gambaran tentang capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2007-2012.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dilakukan pengukuran terhadap 14 sasaran strategis dan 138 indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2012 melalui analisis dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja, sehingga diperoleh rata-rata tingkat pencapaian masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran strategis ”Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunya angka kemiskinan”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 109,00% dengan predikat Sangat Baik
2. Sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 88,92%, dengan predikat Baik
3. Sasaran strategis ”Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 186,21%, dengan predikat Sangat Baik

4. Sasaran strategis ”Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 142,50%, dengan predikat Sangat Baik
5. Sasaran strategis ”Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 128,72%, dengan predikat Sangat Baik
6. Sasaran strategis ”Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 110,51%, dengan predikat Sangat Baik
7. Sasaran strategis ”Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 86,60%, dengan predikat Baik
8. Sasaran strategis ”Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 108,04%, dengan predikat Sangat Baik
9. Sasaran strategis ”Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 87,89%, dengan predikat Baik
10. Sasaran strategis ”Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam”. memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 89,88%, dengan predikat Baik
11. Sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial”, memperoleh rata-rata persentase

tingkat capaian sebesar 171,83%, dengan predikat Sangat Baik

12. Sasaran strategis ”Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 132,14%, dengan predikat Sangat Baik
13. Sasaran strategis ”Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 94,71%, dengan predikat Baik
14. Sasaran strategis ”Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 81,70%, dengan predikat Baik.

Diantara 14 sasaran strategis tersebut, terdapat 8 (delapan) sasaran strategis mendapat predikat Sangat Baik dan 6 (enam) sasaran strategis yang mendapat predikat Baik. Sasaran strategis yang mendapat predikat Sangat Baik merupakan gambaran keberhasilan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan yang mendapat predikat Baik akan ditingkatkan untuk memperoleh predikat Sangat Baik.

Akumulasi tingkat capaian kinerja rata-rata berdasarkan 14 sasaran strategis memperoleh nilai rata-rata sebesar 115,62% dengan predikat Sangat Baik, dibandingkan dengan tingkat capaian akuntabilitas keuangan Pemerintah Aceh pada tahun 2012 sebesar 90,17% berdasarkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.711.938.653.801 hanya mampu direalisasi sebesar Rp. 8.757.321.935.052, dengan demikian terjadi efisiensi sebesar 25,45%.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja secara akumulatif, diakui belum diikuti dengan tingkat pencapaian yang optimal setiap indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian beberapa indikator kinerja, antara lain ; penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja yang belum optimal, sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi SDM yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang sulit terjangkau dalam pencapaian program dan kegiatan pembangunan.

Dalam meminimalisir kendala tersebut Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh, serta peningkatan SDM yang berbasis kompetensi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Aceh Tahun 2012 yang merupakan salah satu media pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh.

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH ACEH

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. ZAINI ABDULLAH
Jabatan : GUBERNUR ACEH

Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banda Aceh, 2 Juli 2012

GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2012

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3,2	%	5,2	162,50
		Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6,5	%	6,06	93,23
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	35,2	Triliun	36,60	103,98
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	32,8	Triliun	32,68	99,63
		Persentase penurunan angka pengganggguran terbuka *)	1	%	0,39	39,00
		Persentase penurunan angka penduduk miskin *)	2	%	1	50,00
		Persentase peningkatan konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8	%	5,62	70,25
		Persentase peningkatan pendapatan Aceh dari sumber dana perimbangan	4,29	%	4,29%	100,00
		Persentase peningkatan penerimaan Aceh dari sumber dana otonomi khusus	17,6	%	17,6 %	100,00
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan *)				
		a. Padi	1.889.996	Ton	1.727.776	91,42
		b. Jagung	148.525	Ton	158.141	106,47
		c. Kedelai	57.016	Ton	49.860	87,45
		d. Kacang Tanah	6.293	Ton	6.895	109,57
		e. Kacang Hijau	1.309	Ton	1.435	109,63
		f. Ubi Kayu	41.286	Ton	37.869	91,72
		g. Ubi Jalar	15.768	Ton	13.906	88,19

1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan *)				
		a. Padi	46,63	Ku/Ha	46,44	99,59
		b. Jagung	37,57	Ku/Ha	39,84	106,04
		c. Kedelai	14,07	Ku/Ha	14,09	100,14
		d. Kacang Tanah	11,86	Ku/Ha	12,20	102,87
		e. Kacang Hijau	10,50	Ku/Ha	10,59	100,86
		f. Ubi Kayu	127,58	Ku/Ha	128,63	100,82
		g. Ubi Jalar	105,68	Ku/Ha	105,75	100,07
		Persentase luas lahan pengendalian OPT				
		a. Padi	52	%	51,95	99,90
		b. Jagung	25	%	15,22	60,88
		c. Kedelai	36	%	39,13	108,69
		d. Kacang Tanah	10	%	11,57	115,70
		e. Ubi Kayu	28	%	28,27	100,96
		Luasan lahan yang dioptimasi	2.346	Ha	2.346	100,00
		Jumlah Desa Mandiri Pangan	40	Desa	34 desa	85,00
		Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam sektor pertanian	1.500	Orang	1800	120,00
		Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290	Unit	340	117,24
		Penurunan aktifitas illegal fishing di perairan Aceh	2	Wpp (571-572)	2 Wpp (12 Kasus)	100,00
		Jumlah Produksi perikanan budidaya *)	116.875	Ton	40.483,5 Ton	34,60
		Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4	Unit	4	100,00
		Jumlah produksi perikanan tangkap *)	152.972	Ton	146.265,5 Ton	95,60
		Jumlah produksi olahan	48	Ton	52,4	109,20
		Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10	Jenis	10	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah				
		a. Karet (kering)	65.264	Ton	82.535 ton	126,46
		b. Kelapa Sawit (cpo)	182.305	Ton	216.249 ton	118,62
		c. Kopi (biji kering)	50.949	Ton	52.290 ton	102,63
		d. Kakao (biji kering)	37.582	Ton	30.958 ton	82,37
		Jumlah produksi hasil hutan (HTI) *)	33.000	M^3	988,18 M^3	3,00
		Luas pemulihan kawasan hutan	726	Ha	726 Ha	100,00
		Persentase peningkatan populasi ternak *)	2	%	1,90	95,00
		Persentase peningkatan populasi ternak besar	2	%	13,66	683,00
		Persentase Peningkatan populasi ternak kecil	5	%	3,92	78,40
		Persentase peningkatan populasi ternak unggas	10	%	1,18	11,80
		Persentase peningkatan jmlh ternak yg mendapat pelayanan kesehatan hewan	20	%	36,39	182,00
		Persentase peningkatan konsumsi daging	5	%	1,27	25,00
		Persentase peningkatan konsumsi telur	10	%	0,54	5,00
		Persentase peningkatan konsumsi susu	3	%	3,00	100
		Persentase peningkatan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan	5	%	5	100
		Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5	%	2.05	41.00
		Jumlah gampong yang mendapat bantuan keuangan peumakmue gampong (BKPG) *)	5.986	Gampong /Desa	6.415	107,17
		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong	85	%	100	117,65

1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah sarana permukiman transmigrasi				
		a. APBA	152	KK	197	129,61
		b. APBN	397	KK	447	112,59
		Jumlah kelompok UEPG, PEPG, UEG-SP yang mendapat pembinaan	29	Kelompok	25	86,21
		Jumlah Peningkatan Nilai realisasi investasi *)	2 triliun	Rupiah	1.269.203.702.854	63,46
		Jumlah usaha koperasi yang berkualitas	30	Unit	57	190,00
		Persentase peningkatan nilai ekspor *)	2	%	0,76	38,12
		Jumlah peningkatan populasi Usaha Kecil Menengah (UKM)	400	UKM	1849	462,25
		Persentase peningkatan populasi Industri Kecil Menengah (IKM)	25	%	38,42	153,68
2	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik *)	1.050	Km	494,81	47,12
		Jumlah rumah sehat sederhana yang terbangun	869	Unit	914	105,18
		Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	80.000	M	63.152	78,94
		Panjang jaringan distribusi air minum	110.000	M	99.296	90,27
		Jumlah sarana dan prasarana pedesaan yang terbangun				
		a. Jalan dan Jembatan	110	Km	108	98,18
		b. Sarana dan Prasarana Gedung	95	Unit	105	110,53
		c. Sarana dan Prasarana Mesjid/ Meunasah	192	Unit	177	92,19
3	Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai	Luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik *)	45.000	Ha	148.931	330,96
		Jumlah lokasi pembangunan pengaman pantai	36	Lokasi	68	188,89

1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah lokasi pembangunan pengendalian banjir	120	Lokasi	150	125,00
		Jumlah Waduk/embung yang berfungsi dengan baik *)	6	Unit	6	100,00
4	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika	Jumlah fasilitas perhubungan transportasi darat yang memenuhi standar pelayanan minimal	9	Gedung PKB	8	88,89
			6	Traffic light	8	133,33
			1	Unit Zona Keselamatan	1	100,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan telematika *)	10	%	10	100,00
		Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang kelancaran dan ketertiban distribusi Barang dan Penumpang	13	Unit Terminal Angkutan Barang/ Penumpang	20	153,85
			2	Unit Terminal Pelabuhan	7	350,00
			7	Unit Fasilitas Bandara	5	71,43
5	Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan *)	3	Jenis	2	66,67
		Jumlah desa pada setiap Kabupaten/ Kota yang terpenuhi jaringan listrik belum terjangkau oleh PLN	13	Kab/Kota	8	61,54
		Penurunan aktifitas pertambangan tanpa izin	10	%	5,4	54,00
		Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	1	%	1,36	136,00
		Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB	0,5	%	0,56	112,00
		Rasio desa ketersediaan air bersih dari sumber air tanah	7	%	8,80	125,71

1	2	3	4	5	6	7
		Rasio Desa berlistrik	0.09	%	0,33	366,67
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik *)	0.08	%	0,13	162,50
		Jumlah penyediaan air bersih di daerah krisis air melalui pengeboran air tanah, penurapan mata air dan bak penampungan	48	lokasi	49	102,08
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI)	4	Kab/Kota	4	100,00
6	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kota yang mendapat penghargaan lingkungan *)	5	Kota	2	40,00
		Jumlah sekolah/dayah/pesantren yang mendapat penghargaan lingkungan	6	Sekolah	7	116,67
		Jumlah perusahaan/instansi/jasa yang sudah mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen yang dimiliki	21	Perusahaan	18	85,71
		Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi/polusi	4	Industri	7	175,00
		Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai RTH	3	Kab/Kota	4	133,33
		Jumlah desa yang dijadikan model dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan	1	Desa	1	100,00
		Jlh kasus pengaduan pengelolaan limbah industri yg ditindaklanjuti	3	Kasus	4	133,33
		Jumlah kawasan konservasi sumber daya alam yang dilindungi *)	6	Lokasi	6	100,00

1	2	3	4	5	6	7
7	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Tingkat angka kelulusan SD/MI *)	99	%	99	100,00
		Tingkat angka kelulusan SMP/MTs *)	95	%	99,39	100,39
		Tingkat angka kelulusan SMA/MA *)	89	%	98,88	99,88
		Tingkat angka kelulusan SMK	85	%	78,61%	79,40
		Persentase penurunan jumlah penduduk buta aksara penduduk usia produktif 15-44 tahun	2.85	%	1,52%	53,33
8	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP/MTs *)	7.31	Nilai	7,80	106,7
		Rata-rata nilai UN SMA/MA *)	7.40	Nilai	7,70	104,00
		Rata-rata nilai UN SMK	7.00	Nilai	7,41	105,85
		Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	22	Sekolah	28	127,27
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/D4 sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				
		a. SD/MI	40	%	29	72,50
		b. SMP/MTs	60	%	75	125,00
		c. SMA/MA/SMK	85	%	91	107,06
		Jumlah masyarakat Aceh yang mendapat bantuan biaya pendidikan (S-1, S-2 dan S-3) dalam dan luar negeri	8.127	Orang	9.425	115,97
9	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Tingkat pelayanan kesehatan sesuai SPM	90	%	90	100,00
		Tersedianya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)	4,359,791	Jiwa	4,359,791	100,00
		Rasio angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup *)	16	per 1000 LH	9	143,75
		Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup *)	118	per 100.000 LH	192	37,29
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH) *)	68,8	Tahun	68,8	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Angka kesakitan malaria	1.09	per mil	0,65	59,63
		Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +	92	%	99	107,61
		Angka Acute Flasid Paralysis (AFP) pada anak usia <15 tahun	4.96	per 100.000 anak	4,3	86,69
		Angka kesakitan Demam berdarah Dengue (DBD)	57	per 100.000 penduduk	51	89,47
		Presentase Balita dengan Gizi Buruk	0,3	%	0,10	33,33
		Jumlah pasien kesehatan jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas)	3,390	Pasien	4.324	127,40
		Jumlah Pasien Jiwa yang bebas Pasung	20	Pasien Pasung	22	110,00
		Jumlah pemulangan pasien (dropping) kesehatan jiwa	200	Pasien	95	47,50
10	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat islam	Penanganan pelanggaran syariat Islam *)	150	Kasus	98	65,33
		Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) *)	7 triliun	Rupiah	10.530.000.000	150,43
		Jumlah produk makanan, Obat-obatan dan Kosmetika mendapat sertifikasi Halal	10	Produk	6	60,00
		Jumlah Fatwa Ulama, himbauan, seruan dan Taushiyah yang diterbit	19	dokumen	8	42,11
		persentase penurunan kasus pelanggaran Qanun dan Pergub	18	%	10	56,00
		persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12	%	9	75,00
		rasio penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam di Mahkamah Syariah dengan jumlah kasus yang ditangani	20	%	20	100,00
		Jumlah gampong percontohan bersyariat Islam	2	Gampong	2	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Advokasi terhadap Qanun, Pergub, Kepgub Syariat Islam	250	Kasus	213	85,00
		Jumlah Qari-Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	98	Orang	98	100,00
		Jumlah Ran Qanun Bidang Syariat Islam yang disusun	2	Ran Qanun	2	100,00
		Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150	Orang	150	100,00
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas Imeum Mesjid, Imeum Meunasah dan Remaja Mesjid dalam pelaksanaan syariat Islam	446	Orang	600	134,53
11	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *)	2.312	Orang	8.603 orang	372,10
		Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhab untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kaum dhuafa	364	Unit	159 unit	43,68
		Jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	7.171	Orang	7.151 orang	99,72
12	Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh *)	29.400	Orang	28.993	98,62
		Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh *)	997.620	Orang	1.026.800	102,92
		Jumlah pengembangan objek pariwisata	20	Objek	31	155,00
		Persentase penyelesaian kasus perselisihan Adat	50	%	86	172,00
13	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ ditetapkan *)	790	Dokumen	973	123,16
		a. Keputusan Gubernur	*700*	*Dokumen*	*864*	*123,43*
		b. Peraturan Gubernur	*80*	*Dokumen*	*94*	*117,5*
		c. Qanun	*10*	*Dokumen*	*15*	*150*

1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah gugatan terhadap pemerintah daerah yang diselesaikan	5	Kasus	5	100,00
		Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan *)	190	LHP	170	89,47
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	35	Kasus	37	105,71
		Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%	100	100,00
		Persentase kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	86	%	86	100,00
		Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	10.91	%	10,32	94,59
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh *)	10	%	13,03	130,30
		Jumlah Unit Layanan yang telah memiliki Standart Operational Prosedur (SOP) berstandart International	2	Unit	1	50,00
		Jumlah penggunaan aplikasi pendukung E-gov Pemerintah Aceh untuk pemenuhan pelayanan informasi publik	7	Aplikasi	4	57,00
		Persentase Peningkatan Asset Milik Pemerintah Aceh yang digunausahakan	85	%	85	100,00
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat *)	100	%	100	100,00
		Jumlah penerbitan dokumen izin dan non izin	9.346	Dokumen	5.883	62,95
		Persentase penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	77.67	%	76,77	98,84
		Persentase tingkat kehadiran Aparatur dalam peningkatan disiplin	100	%	98	98,00
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat struktural dan teknis/fungsional	15	%	15	100,00
14	Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana.	*Persentase penanganan dan pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana *)*	25	%	20,83	83,30
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	75	%	60,1	80,10

Jumlah Anggaran Tahun 2012 Rp. 5.999.900.002.643,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2012 Rp. 5.348.941.314.859,-

PENETAPAN KINERJA

PROVINSI : ACEH
TAHUN : 2012

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3,20 %
		Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6,5 %
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	35,2 Triliun
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	32,8 Triliun
		Persentase penurunan angka pengganggguran terbuka	1 %
		Persentase penurunan angka penduduk miskin	2 %
		Persentase konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8 %
		Persentase peningkatan pendapatan Aceh dari sumber dana perimbangan	0,75 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase penerimaan Aceh dari sumber dana otonomi khusus	**5,31 %**
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan	**1.889.996 Ton Padi** **148.525 Ton Jagung** **57.016 Ton Kedelai** **6.293 Ton Kc. Tanah** **1.309 Ton Kc. Hijau** **41.286 Ton Ubi Kayu** **15.768 Ton Ubi Jalar**
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan	**46,63 Ku/Ha Padi** **37,57 Ku/Ha Jagung** **14,07 Ku/Ha Kedelai** **11,86 Ku/Ha Kc. Tanah** **10,50 Ku/Ha Kc. Hijau** **127,58 Ku/Ha Ubi Kayu** **105,68 Ku/Ha Ubi Jalar**
		Persentase luas lahan pengendalian OPT :	
		- Padi	**52 %**
		- Jagung	**25 %**
		- Kedelai	**36 %**
		- Kacang Tanah	**10 %**
		- Ubi Kayu	**28 %**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Luasan lahan yang dioptimasi	2.346 Ha
		Jumlah Desa Mandiri Pangan	40 Desa
		Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam sektor pertanian	1500 orang
		Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290 unit
		Penurunan aktifitas illegal fishing di perairan Aceh	2 Wpp (571-572)
		Jumlah Produksi perikanan budidaya	116.875 Ton
		Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4 Unit
		Jumlah produksi perikanan tangkap	152.972 Ton
		Jumlah produksi olahan	48 Ton
		Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10 Jenis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah	65.164 Ton (Karet Kering) 182.305 Ton Kelapa Sawit (CPO) 50.949 Ton Kopi (Biji Kering) 37.582 Ton Kakao (biji Kering)
		Jumlah produksi hasil hutan (HTI)	33.000 M3
		Luas pemulihan kawasan hutan	726 Ha
		Persentase peningkatan populasi ternak	2 %
		Persentase peningkatan populasi ternak besar	2 %
		Persentase Peningkatan populasi ternak kecil	5 %
		Persentase peningkatan populasi ternak unggas	10 %
		Persentase peningkatan jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	20 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase peningkatan konsumsi daging	5 %
		Persentase peningkatan konsumsi	10 %
		Persentase peningkatan konsumsi susu	3 %
		Persentase peningkatan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan	5 %
		Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5 %
		Jumlah gampong yang mendapat bantuan keuangan peumakmue gampong (BKPG)	5.986 Gampong
		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong	85 %
		Jumlah sarana permukiman transmigrasi	152 kk - APBA 397 kk - APBN
		Jumlah kelompok UEPG, PEPG, UEG-SP yang mendapat pembinaan	29 Kelompok

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah Peningkatan Nilai realisasi investasi	2 Trilun Rupiah
		Jumlah usaha koperasi yang berkualitas	130 Unit koperasi
		Persentase peningkatan nilai ekspor	2 %
		Persentase peningkatan populasi Usaha Kecil Menengah (UKM)	400 UKM
		Persentase peningkatan populasi Industri Kecil Menengah (IKM)	2,5 %
2	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/ prasarana permukiman	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1.050 Km
		Jumlah rumah sehat sederhana yang terbangun	869 Unit
		Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	80.000 M
		Panjang jaringan distribusi air	110.000 M

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah sarana dan prasarana pedesaan yang terbangun :	
		- Jalan dan Jembatan	110 Km
		- Sarana dan Prasarana Gedung	95 Unit
		- Sarana dan Prasarana Mesjid/ Meunasah	192 Unit
3	Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai	Luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik	45.000 Ha
		Jumlah lokasi pembangunan pengaman pantai	36 Lokasi
		Jumlah lokasi pembangunan pengendalian banjir	120 Lokasi
		Jumlah Waduk/embung yang berfungsi dengan baik	6 Unit
4	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika	Jumlah fasilitas perhubungan transportasi darat yang memenuhi standar pelayanan minimal	9 Unit Gedung PKB 6 Traffic light 1 Unit Zona Keselamatan
		Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan telematika	10 %
		Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang kelancaran dan ketertiban distribusi Barang dan Penumpang	13 Unit Terminal Angkutan Barang/Penumpang 2 Unit Terminal Pelabuhan 7 Unit Fasilitas Bandara

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	3 Lokasi
		Jumlah desa pada setiap Kabupaten/Kota yang terpenuhi jaringan listrik belum terjangkau oleh PLN	13 Kab/Kota
		Penurunan aktifitas pertambangan tanpa izin	10 %
		Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	0,01 %
		Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB	0,05 %
		Rasio desa ketersediaan air bersih dari sumber air tanah	0,7 %
		Ratio Desa berlistrik	0,09 %
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	0,08 %
		Jumlah penyediaan air bersih di daerah krisis air melalui pengeboran air tanah, penurapan mata air dan bak penampungan	48 lokasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI)	4 Kab/Kota
6	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kota yang mendapat penghargaan lingkungan	5 Kota
		Jumlah sekolah/dayah/pesantren yang mendapat penghargaan lingkungan	6 Sekolah
		Jumlah perusahaan/instansi/jasa yang sudah mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen yang dimiliki	21 Perusahaan
		Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi/polusi	4 industri
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang sudah mempunyai RTH	3 Kab/Kota
		Jumlah desa yang dijadikan model dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan	1 desa
		Jumlah kasus pengaduan pengelolaan limbah industri yang ditindaklanjuti	3 Kasus

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah kawasan konservasi sumber daya alam yang dilindungi	6 Lokasi
7	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Tingkat angka kelulusan SD/MI	99 %
		Tingkat angka kelulusan SMP/MTs	95 %
		Tingkat angka kelulusan SMA/MA	89 %
		Tingkat angka kelulusan SMK	85 %
		Persentase penurunan jumlah penduduk buta aksara penduduk usia produktif 15-44 tahun	2,85 %
8	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	7,31 Nilai
		Rata-rata nilai UN SMA/MA	7,40 Nilai
		Rata-rata nilai UN SMK	7,00 Nilai
		Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	6 Sekolah
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/D4 sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	40 % SD/MI 60 % SMP/MTS 85 % SMA/MA/SMK

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah masyarakat Aceh yang mendapat bantuan biaya pendidikan (S-1, S-2 dan S-3) dalam dan luar negeri	8.127 Orang
9	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Tingkat pelayanan kesehatan sesuai SPM	90 %
		Tersedianya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)	4.359.791 Jiwa
		Rasio angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	16 per 1000 LH
		Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118 per 100.000 LH
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	68,8 Tahun
		Angka kesakitan malaria	10,9 per 1000 penduduk
		Angka kesembuhan penderita TB	92 %
		Angka Acute Flasid Paralysis (AFP) pada anak usia <15 tahun	4,96 per 100.000 anak
		Angka kesakitan Demam berdarah Dengue (DBD)	57 per 100.000 penduduk

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Presentase Balita dengan Gizi Buruk	0,3 %
		Jumlah pasien kesehatan jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas)	3.390 Pasien
		Jumlah Pasien Jiwa yang bebas Pasung	20 Pasien Pasung
		Jumlah pemulangan pasien (dropping) kesehatan jiwa	200 Pasien
10	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam	Penanganan pelanggaran syariat	150 Kasus
		Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS)	7.000.000.000 Rupiah
		Jumlah produk makanan, Obat-obatan dan Kosmetika mendapat sertifikasi Halal	10 Produk
		Jumlah Fatwa Ulama, himbauan, seruan dan Taushiyah yang diterbit	19 dokumen
		persentase penurunan kasus pelanggaran Qanun dan Peraturan Gubernur	18 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12 %
		rasio penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam di Mahkamah Syariah dengan jumlah kasus yang ditanganai	20 %
		Jumlah gampong percontohan bersyariat Islam	23 Gampong
		Advokasi terhadap Qanun, Pergub, Kepgub Syariat Islam	250 Kasus
		Jumlah Qari-Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	98 Orang
		Jumlah Ran Qanun Bidang Syariat Islam yang disusun	2 Qanun
		Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150 Orang
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas Imeum Mesjid, Imeum Meunasah dan Remaja Mesjid dalam pelaksanaan syariat Islam	446 Orang

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.312 Orang
		Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhab untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kaum dhuafa	364 Unit
		Jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	7.171 Orang
12	Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	29.400 Orang
		Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	997.620 Orang
		Jumlah pengembangan objek pariwisata	20 Objek
		Persentase penyelesaian kasus perselisihan Adat	50 %
13	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ ditetapkan	700 Keputusan Gubernur 80 Peraruran Gubernur 10 Qanun
		Jumlah gugatan terhadap pemerintah daerah yang diselesaikan	5 Kasus

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	190 LHP
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	35 Kasus
		Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100 %
		Persentase kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	86 %
		Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	10,91 %
		Persentase Peningkatan Pendapatan	1 %
		Jumlah Unit Layanan yang telah memiliki Standart Operational Prosedur (SOP) berstandart	2 Unit
		Jumlah penggunaan aplikasi pendukung E-gov Pemerintah Aceh untuk pemenuhan pelayanan informasi publik	7 Aplikasi
		Persentase Peningkatan Asset Milik Pemerintah Aceh yang digunausahakan	85 %
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %
		Persentase peningkatan penerbitan dokumen izin dan non izin	1 %
		Persentase penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	77,67 %
		Persentase tingkat kehadiran Aparatur dalam peningkatan disiplin	100 %
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat struktural dan teknis/fungsional	15 %
14	Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana	persentase pengurangan risiko bencana Kab/Kota rawan bencana	25 %
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	75 %

Jumlah Anggaran Tahun 2012 Rp. 5.539.051.095.868,-

GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH